

TUGAS AKHIR

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU



Oleh :

Azrul Mustakim

143410720

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Oleh:

AZRUL MUSTAKIM

143410720

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar terbilang cukup signifikan. Kecamatan Batu Hampar merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir. Pada dasarnya kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa kemasa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna dan relevan. Maka dari itu pengajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus diupayakan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan serta strategi penanganan kemiskinan. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Hasil yang didapatkan dari strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau antara lain dengan melakukan optimalisasi dan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, peningkatan swadaya masyarakat dalam kualitas ekonomi, meningkatkan manajemen pasar, mempermudah dalam hal pemberian sertifikat tanah dan dalam mendirikan usaha perekonomian. Program yang mengatasi akan masalah kemiskinan antara lain; meningkatkan pelayanan dan produktivitas pasar tradisional di Kecamatan Batu Hampar, mengembangkan kegiatan UMKM masyarakat untuk mengembangkan usaha, membuat suatu organisasi pemuda dalam melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya peningkatan produksi pertanian, sosialisasi keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Strategi, Masyarakat, Perekonomian

STRATEGY FOR MANAGING COMMUNITY POVERTY IN BATU HAMPAR DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY, RIAU PROVINCE

By:

AZRUL MUSTAKIM

143410720

Urban and Regional Planning Study Program

Faculty of Engineering, Islamic University of Riau

ABSTRACT

Poverty in Batu Hampar District is quite significant. Batu Hampar District is a district located in Rokan Hilir Regency. Basically poverty is a classic problem that has existed since mankind existed. Poverty is a complex problem, with many faces, and it seems that it will continue to be an actual problem from time to time. Although until now there has not been found a formula or formula for poverty alleviation that is considered the most effective and relevant. Therefore, the study of concepts and strategies for poverty alleviation must continue to be pursued. The purpose of this study was to identify the characteristics of poverty in Batu Hampar District, Rokan Hilir Regency.

This study uses a quantitative descriptive method which aims to describe the characteristics of poverty, the causes of poverty and strategies for dealing with poverty. Quantitative method can be defined as a research method based on the philosophy of positivism, used to examine a particular population or sample.

The results obtained from the poverty management strategy in Batu Hampar District, Rokan Hilir Regency, Riau Province, among others, by optimizing and increasing agricultural production and productivity, increasing community self-help in economic quality, improving market management, making it easier to grant land certificates and in establishing an economic business. Programs that address the problem of poverty include; improve services and productivity of traditional markets in Batu Hampar District, develop community UMKM activities to develop businesses, create a youth organization in preserving and maintaining traditions and culture of increasing agricultural production, socializing the benefits that will be obtained by the community by cooperating with the government.

Keywords: Poverty, Strategy, Society, Economy Poverty, Strategy, Society, Economy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul *“Strategi Penanganan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Studi Kasus: di Kecamatan Batu Hampar)”* untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (satu) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau.

Melalui Pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota untuk menerapkan ilmu perencanaan yang telah diterima selama perkuliahan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang telah banyak member dukungan dan dorongan baik secara moril maupun materi.
2. Bapak Dr.Eng. Muslim, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dan pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Instansi-instansi terkait yang berada di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Teman – teman Planologi C'14 yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, menjadi ukuran bagi kesempurnaan tugas akhir ini. Maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Demikian dengan selesainya tugas akhir ini, penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini berguna dan bermanfaat fi kemudian hari.

Pekanbaru, November 2021

Azrul Mustakim

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup.....	9
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi	9
1.5.2 Ruang Lingkup Materi.....	13
1.6 Kerangka Berfikir.....	14
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Dasar dan Defenisi Kemiskinan.....	18
2.1.1 Defenisi Kemiskinan	18
2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan	21

2.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan	22
2.2.1 Bentuk Kemiskinan Berdasarkan Sifat.....	24
2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan	27
2.3.1 Tingkat Pendidikan Yang Rendah	27
2.3.2 Terbatasnya Lapangan Pekerjaan.....	29
2.3.3 Malas Bekerja.....	29
2.3.4 Beban Hidup Keluarga	30
2.3.5 Keterbatasan Sumber Daya (Alam Maupun Modal)	30
2.4 Indikator Kemiskinan.....	31
2.5 Pengertian Penanganan Kemiskinan	34
2.6 Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan	35
2.6.1 Strategi Penanganan Kemiskinan	35
2.6.2 Program Penanganan Kemiskinan.....	37
2.7 Analisis SWOT	39
2.8 Sintesa Teori.....	47
2.9 Penelitian Terdahulu	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	54
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	54
3.3.1 Jenis Data Penelitian	54
3.3.2 Sumber Data Penelitian.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	56
3.4.1 Data Primer	56
3.4.2 Data Sekunder	58
3.5 Populasi dan Sampel	59
3.5.1 Populasi	59
3.5.2 Teknik Sampel	59
3.6 Teknik Analisis Data.....	62
3.6.1 Analisi Deskriptif Kuantitatif.....	63
3.6.2 Karakteristik Kemiskinan.....	64
3.6.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan	68
3.6.4 Strategi Penanganan Kemiskinan.....	72
3.7 Variabel Penelitian	74

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	77
4.1.1 Luas Wilayah Dan Batas Admministrasi.....	79
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografi.....	82
4.1.3 Klimatologi	83
4.1.4 Kependudukan.....	83
4.1.5 Penggunaan Lahan	86
4.2 Gambaran Kecamatan Batu Hampar.....	87
4.2.1 Kondisi Geografis	87
4.2.2 Kondisi Alam	90
4.2.3 Kependudukan.....	91
4.2.4 Pendidikan.....	96
4.2.5 Kesehatan	98
4.2.6 Ekonomi	102

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Batu Hampar	106
---	-----

5.1.1 Kesehatan Kecamatan Batu Hampar.....	106
--	-----

5.1.2 Pendidikan Kecamatan Batu Hampar	116
--	-----

5.1.3 Standar Kehidupan Kecamatan Batu Hampar.....	122
--	-----

5.2 Faktor Kemiskinan Kecamatan Batu Hampar	129
---	-----

5.3 Strategi Penanganan Kemiskinan.....	139
---	-----

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan	144
----------------------	-----

6.2 Saran.....	146
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	148
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	153
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sintesis Faktor Tigrat Pendidikan	28
Tabel 2.2	Indikator Utama Kemiskinan	33
Tabel 2.3	Matrik Analisis SWOT Perumusan Strategi	45
Tabel 2.4	Sintesa Teori	47
Tabel 2.5	Penelitian Sebelumnya	50
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data	58
Tabel 3.2	Distribusi Sampel Perdesa	62
Tabel 3.3	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	68
Tabel 3.4	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	72
Tabel 3.5	Matrik Analisis SWOT	73
Tabel 3.4	Variabel Penelitian	75
Tabel 4.1	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Klarifikasi Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017	79
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2017	81

Tabel 4.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017	85
Tabel 4.4	Luas Lahan Menurut Penggunaan (Ha) Tahun 2017	86
Tabel 4.5	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017	88
Tabel 4.6	Jarak Dari Kantor Desa Ke Kantor Camat dan Kantor Bupati Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017.....	89
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017	92
Tabel 4.8	Rata-Rata Perumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017	93
Tabel 4.9	Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017	95
Tabel 4.10	Jumlah Pendidikan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017	97
Tabel 4.11	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Baru Hampar Tahun 2017.....	99
Tabel 4.12	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017.....	101
Tabel 4.13	Banyaknya Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017	102

Tabel 4.14	Jumlah Industri Kecil Mikro dan Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017	104
Tabel 4.15	Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017	105
Tabel 5.1	Rekapitulasi Nilai Responden Hasil Variabel Kesehatan	112
Tabel 5.2	Rekapitulasi Nilai Responden Hasil Variabel Pendidikan	119
Tabel 5.3	Rekapitulasi Nilai Responden Hasil Standar Hidup	127
Tabel 5.4	Rekapitulasi Nilai Responden Faktor Kemiskinan	132
Tabel 5.5	Faktor Internal dan Eksternal	139
Tabel 5.6	Matrix SWOT	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Riau	10
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir	11
Gambar 1.3 Peta Lokasi Penelitian	12
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Ritonga, 2003).

Hall dan Midgley (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat secara ekonomi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Karakteristik kemiskinan yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang di bandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Suparlan , 2014)

Karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kultural, struktural, dan sistemik (Kasim, 2006). Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Kemiskinan semacam ini termasuk kemiskinan yang paling mendalam dan bersifat kronis. Mereka menerima kondisi hidup sebagaimana adanya, penuh dengan kepasrahan, tidak memperlihatkan keinginan untuk keluar dari kondisi kemelaratan.

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, beban keluarga (Hudyana, 2009).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh Indonesia ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang di Indonesia. Efeknya akan memunculkan kemiskinan structural dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara bagian terbesar masyarakat yang tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan teori “ *trade off between growth and equity* ” yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan atau makin tidak merata, dan

sebaliknya upaya pemerataan dapat terwujud dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah (Todaro 2000).

Valenzuela (2010) masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh rendahnya modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, atau kemampuan membangun. Mereka juga memiliki modal fisik dalam jumlah yang sangat kecil. Lebih lanjut, jika mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik, mungkin mereka tidak memiliki kesempatan bekerja karena adanya diskriminasi.

Pada dasarnya kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual darimasa kemasa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna dan relevan. Maka dari itu pengajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus di upayakan.

Suharto (2003) untuk mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukan ada nya sebuah kajian yang lengkap sebagai acuan perancangan kebijakan dan program anti kemiskinan, dan hampir semua pendekatan yang mengkaji masalah kemiskinan bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dan model yang berpusat pada produksi.

Saharia (2003) dalam strategi penanganan kemiskinan yaitu melakukan pembangunan perdesaan, dimana pertanian di posisikan sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan dan hasil yang memadai. Pertanian dapat menjadi sumber pendapatan yang memadai apabila setiap program melibatkan partisipasi

aktif masyarakat yang ada di wilayah perdesaan sekitar 75% dari total penduduk dan tentunya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dalam hal ini potensi sumber daya manusianya dan potensi sumber daya alamnya.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf” (QS Al-Baqarah [2]:233).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Rokan Hilir yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah 8.881,59 Km² dimana sebelah utara daerahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kota Dumai, dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara. Namun Kabupaten Rokan Hilir masih banyak mengalami permasalahan terutama masalah kemiskinan. Total jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 679.663 jiwa dan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 367.338 jiwa 54% dari jumlah penduduk (BPS ROHIL 2017)

Kecamatan Batu Hampar merupakan sebuah Kecamatan baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Bangko. Dibentuk pada tanggal 29 Juni 2004 berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2004. Kecamatan Batu Hampar terletak berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir dan berhadapan dengan Kota Madya Dumai. Luas wilayah Kecamatan Batu Hampar adalah 178 Km² terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Bantaian, Desa Bantaian Baru, Desa Bantaian Hilir, Desa Sungai sialang Hulu, Desa Sungai sialang, dimana Desa Bantaian merupakan desa terluas yaitu 60 Km² dan desa yang terkecil adalah Desa Bantian Baru dengan luas wilayah 18 Km². Dimana Kecamatan Batu Hampar memiliki penduduk sebanyak 9.564 jiwa dan masyarakat yang menerima bantuan miskin di Kecamatan Batu Hampar sebanyak 307 jiwa 32% dari jumlah penduduk (Dinas Sosial Rohil 2017)

Dipilih Kecamatan Batu Hampar sebagai lokasi penelitian karna di kecamatan ini belum dilakukan penelitian sebelumnya dan dari data BPS bisa lihat bahwa masyarakat di Kecamatan tergolong kedalam masyarakat yang belum sejahtera karna tingginya angka kemiskinan dan oleh sebab itu diperlukan upaya untuk melakukan penanganan agar kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar bisa berkurang setiap tahunnya.

Untuk mencegah lajunya tingkat pertumbuhan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar diperlukan strategi penanganan kemiskinan. perlu diteliti karakteristik kemiskinan dan faktor apa saja penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar. Hal ini tentu mengacu kepada teori-teori yang sudah ada sehingga penulis memberi penelitian ini dengan judul “*Strategi Penanganan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (studi kasus di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir).*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok di daerah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar sangat berakibat terhadap laju pertumbuhan ekonomi, hal ini juga berimbas terhadap pembangunan wilayah, dan belum terperinci karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar
- b. Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Batu Hampar,

seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan, dan keterbatasan modal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

- c. Kurangnya penanganan terhadap kemiskinan yang ada di Kecamatan Batu Hampar sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Batu Hampar

Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar?
- b. Apa saja faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar?
- c. Bagaimana rumusan strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelittian

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi penanganan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

- a. Mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar
- b. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadi nya kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar
- c. Merumuskan strategi penaganan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:

a. Pihak Pemerintah

Bahan masukan yang bermanfaat dalam upaya penanganan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Batu Hampar sehingga menjadi masukan untuk meningkatkan strategi guna mengurangi angka kemiskinan.

b. Pihak Akademis

Sebagai media atau bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, dalam konteks untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang penanganan kemiskinan. diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat menjadi referensi yang dapat diajukan sebagai bahan percontohan bagi penelitian yang sama selanjutnya.

c. Peneliti

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjut nya dalam konteks penanganan kemiskinan di Rokan Hilir umumnya dan di Kecamatan Batu Hampar khususnya.

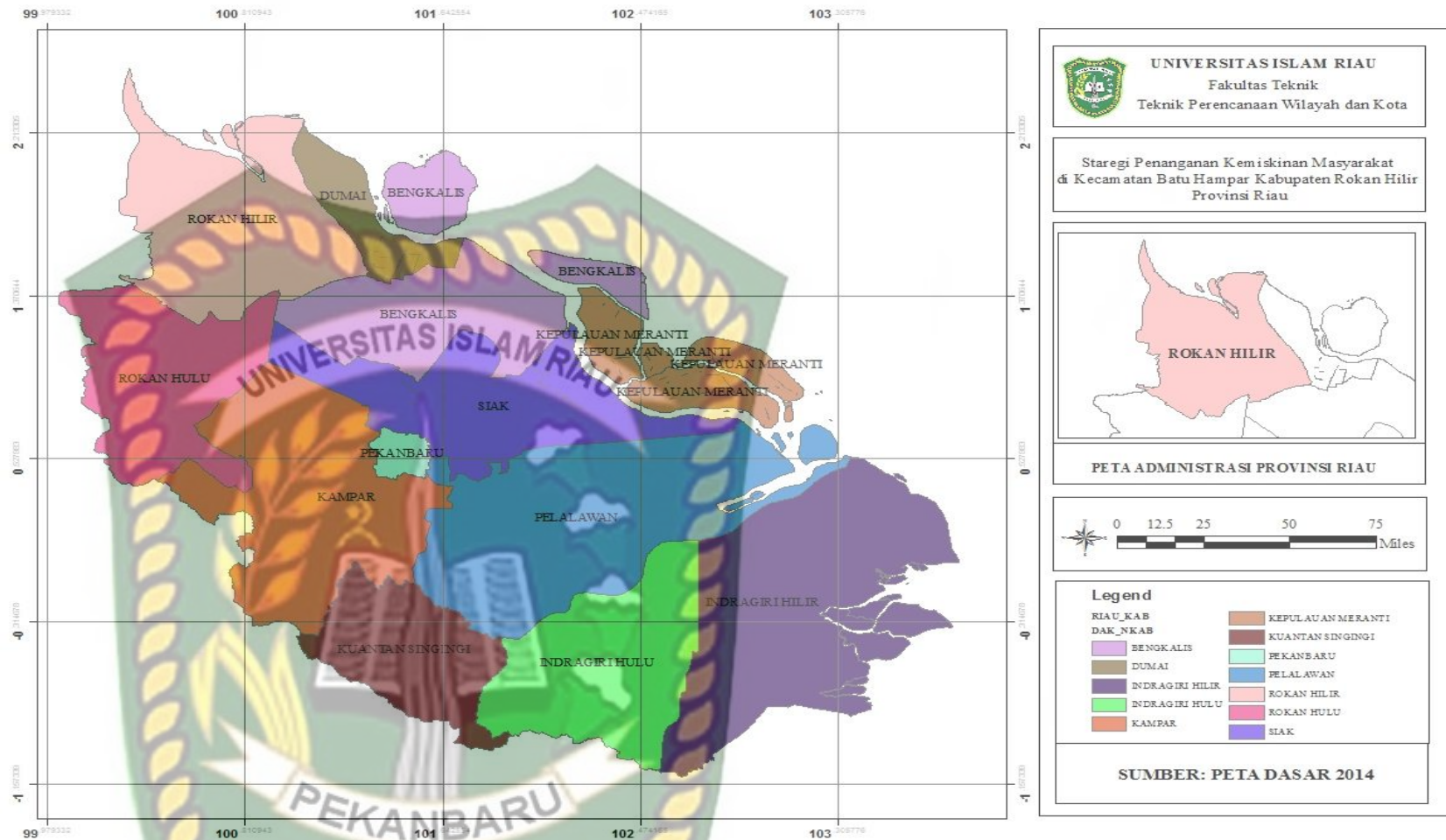
1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam studi penelitian ini ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang lingkup wilayah studi dan ruang materi, ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

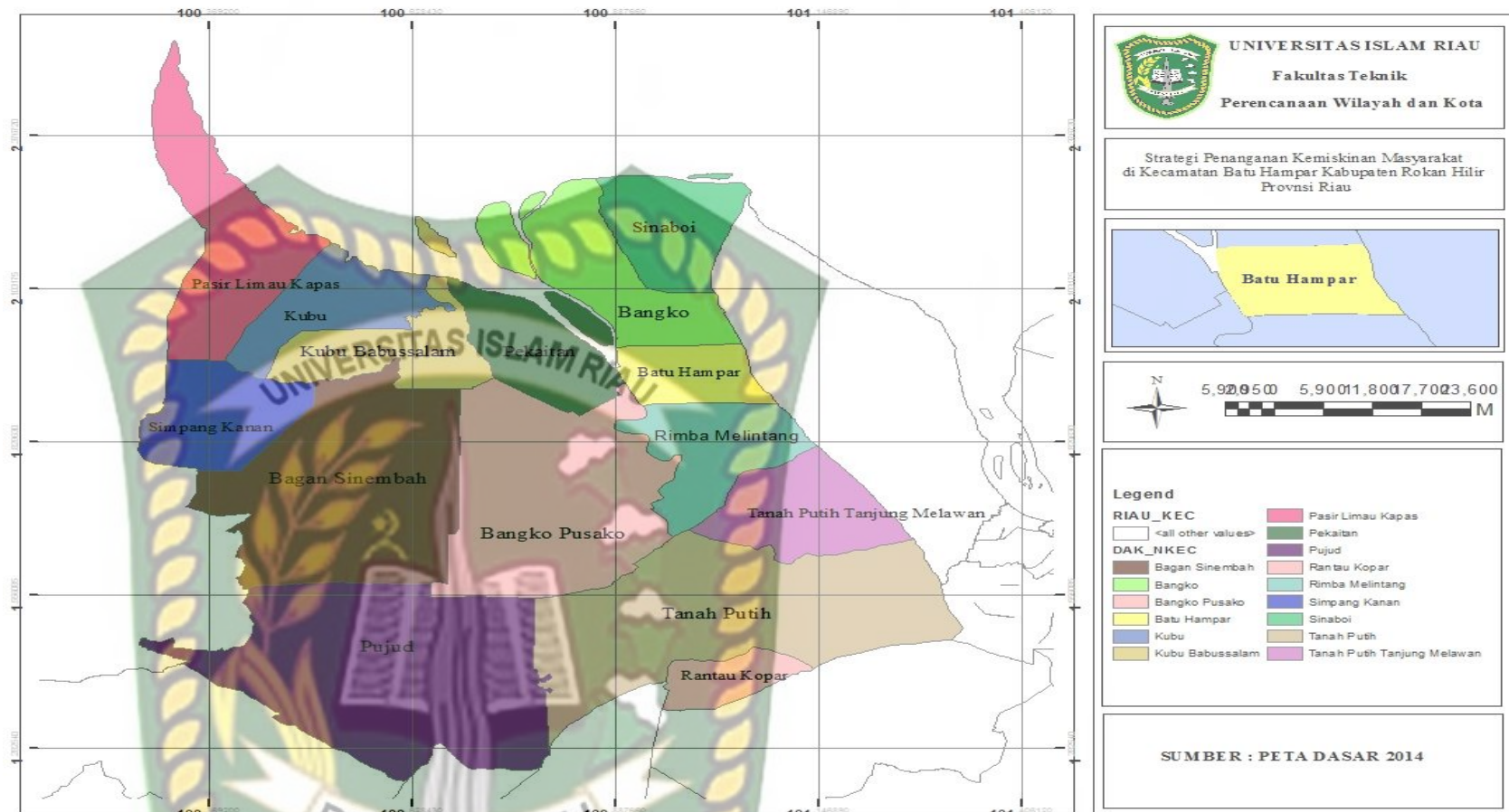
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah didalam penelitian ini adalah Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, dan jumlah penduduk Kecamatan Batu Hampar sebanyak 9.564 Jiwa dari 5 desa

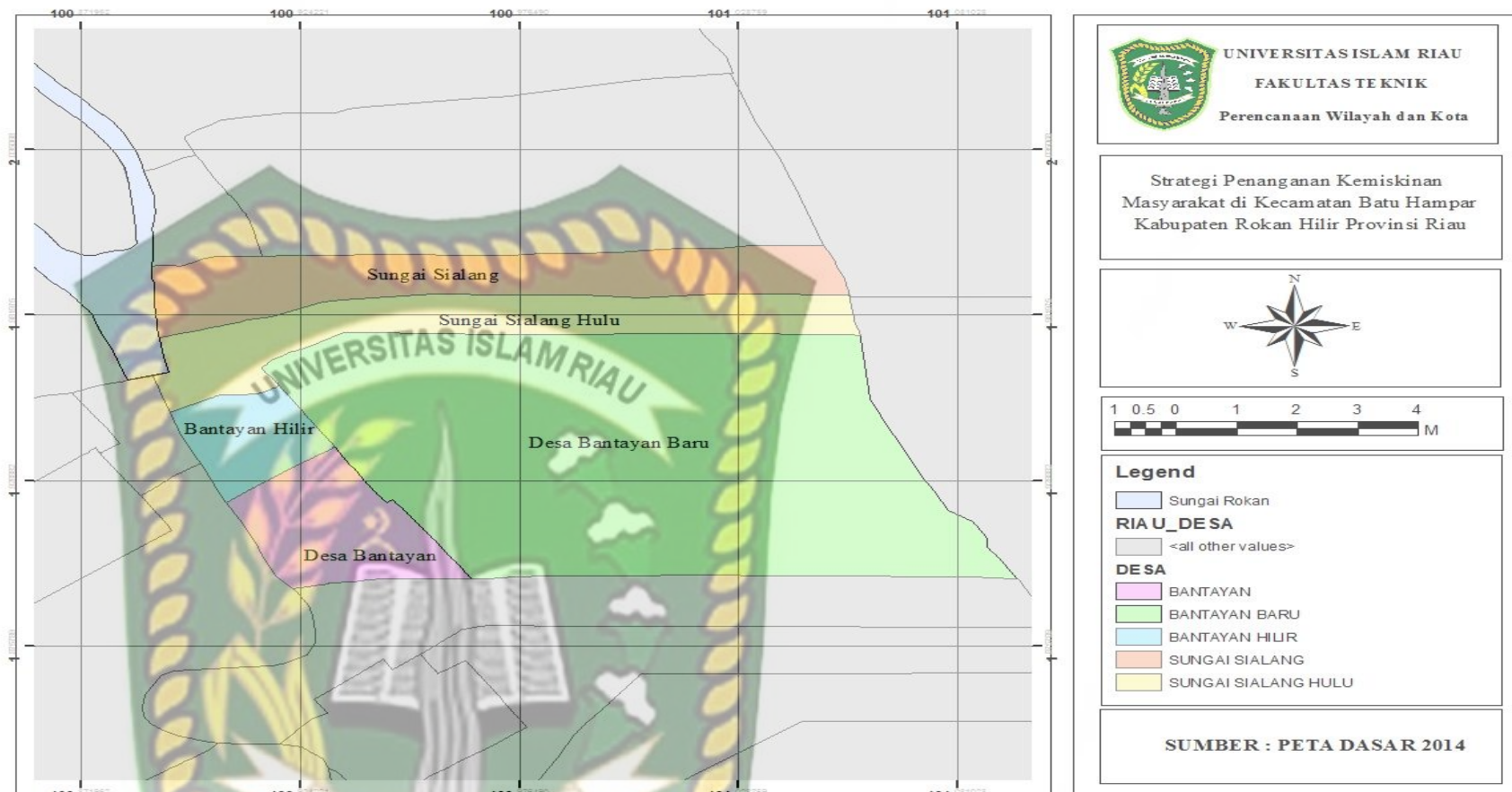
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangko
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sungai Rokan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Madya Dumai



Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Riau



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir



Gambar 1.3 Peta Administrasi Kecamatan Batu Hampar

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar proses analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tingkat kemiskinan, analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan metode deskriptif
- c. Merumuskan strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar, strategi penanganan yang dimaksud yaitu kebijakan pemerintah dan aturan-aturan yang mengatur penanganan kemiskinan berdasarkan faktor penyebab terjadinya tingkat kemiskinan kemudian merekomendasi dari perbandingan kinerja pemerintah dengan perencanaan, pelaksana, dan pengendalian dalam penanganan kemiskinan pada lokasi penelitian. dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif

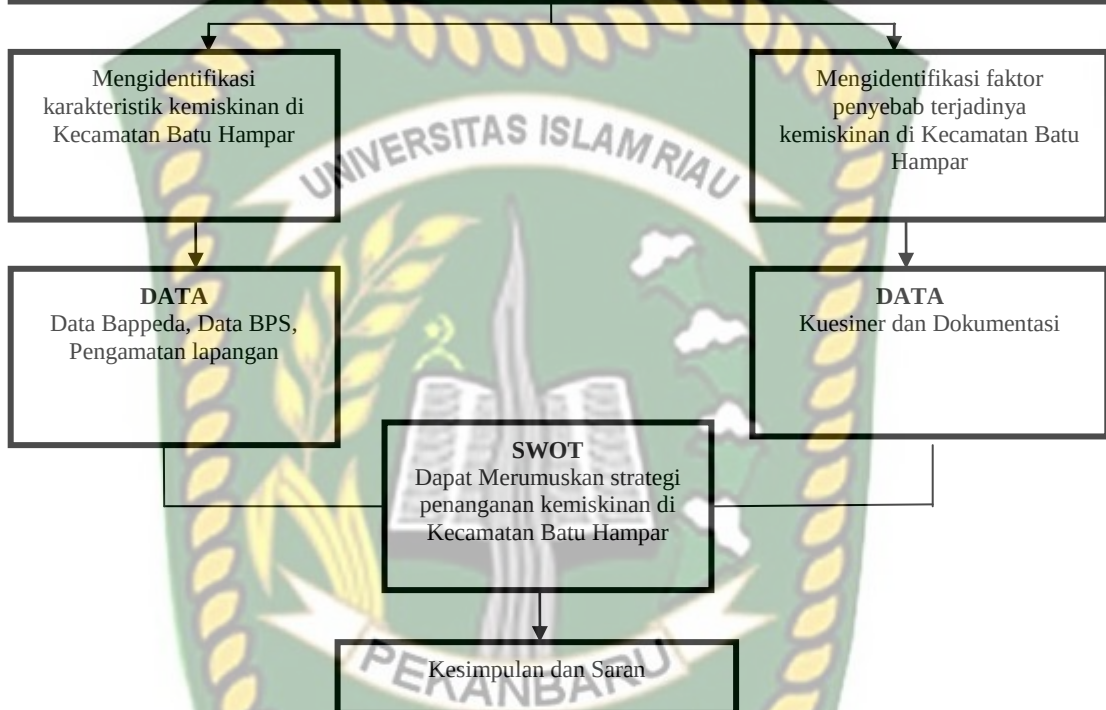
1.6 Kerangka Berfikir

Pengertian kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis premis dasarnya.

Kerangka berfikir ini adalah alternative atau jalan keluar yang paling optimal dalam menangani permasalahan ini. Makadari itu jalan keluarnya yang akan diberikan diantaranya dengan membuat secara diagramatis atau kerangka berfikir, yang mana didalamnya terdapat permasalahan yang akan dibahas yang akan dirangkum di dalam rumusan masalah kemudian diidentifikasi dan menemukan sasaran yang akan dilakukan dengan menggunakan metode apa selanjutnya menentukan analisis apa yang digunakan agar dapat memecahkan persoalan yang akhirnya menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan dan dirangkum dalam kesimpulan dan saran

LATAR BELAKANG

Kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar terbilang cukup signifikan. Kecamatan Batu Hampar adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Data BPS, kecamatan Batu Hampar merupakan salah satu kecamatan yang angka kemiskinannya tergolong cukup tinggi. Banyak faktor penyebab terjadinya kemiskinan, baik berupa, tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan penduduk, jumlah tanggungan dan lainnya, maka dari itu dibutuhkan suatu strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan efektif.



Gambar 1.4 Kerangka Berfikir

Sumber : Hasil Analisis,2021

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan didasarkan atas beberapabab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang konsepsi dasar kemiskinan, pandangan tentang kemiskinan, indikator kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, karakteristik kemiskinan, teori strategi dalam mengatasi kemiskinan, perencanaan pembangunan belum dapat mengatasi kemiskinan, pembangunan dan kemiskinan dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, jenis data penelitian, tahapan penelitian, populasi dan teknik sampel, teknik analisis, dan desain survei.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Pada bab ini akan di bahas tentang gambaran umum wilayah penelitian, gambaran umum karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar, gambaran umum faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas analisis karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Batu hampar, dan strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar dengan menggunakan analisis LFA(*Logical Framewok Analysis*).

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian dari penelitian ini dan saran-saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar dan Definisi Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multi dimensional. Pendekatan yang dilakukan dengan satu bidang ilmu tertentu belum cukup untuk menjelaskan makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah definisi kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum (World Bank, 1990). Pengertian dari kemiskinan sampai saat ini telah mengalami perluasan, karena semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi tetapi telah meluas sampai kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Kemiskinan juga dapat dikatakan dengan suatu keadaan seseorang ketika tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan keahlian yang rendah, keterkucilan sosial karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Singkatnya, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan dalam materi pada sejumlah atau segolongan orang daripada standar

kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 2005).

Satu dari tujuh orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sebagian besar dari mereka hidup dalam pemukiman yang penuh sesak, kekurangan air, sanitasi yang buruk, keamanan yang tidak terkontrol, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan fasilitas pendidikan yang masih kurang memungkinkan. Orang-orang seperti ini menanggung kondisi hidup dengan bekerja yang buruk, rendahnya pendapatan yang tidak memadai, yang semuanya menambah beban kesehatan yang besar atau bahkan kematian dini. Di atas semua masalah ini, kaum miskin memiliki sedikit suara dan sedikit sarana untuk memengaruhi kebijakan dan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Pemerintah dan lembaga bantuan seringkali gagal memahami dan menyediakan bagi masyarakat miskin karena cara mereka mendefinisikan dan mengukur kemiskinan, menggunakan sistem berdasarkan US \$ 1 per garis kemiskinan hari. Ini sangat mengecilkan skala dan kedalaman kemiskinan menetapkan kemiskinan garis terlalu rendah dan kemiskinan tampaknya hilang. Tindakan sederhana semacam itu juga tidak memperhitungkan dimensi penuh dari apa sebenarnya arti kemiskinan bagi orang-orang yang menjalaninya (Mitlin dan Satterthwhite, 2012).

Bappenas (Diah, 2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi jika seseorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan tidak mampu untuk memenuhi hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar dimiliki oleh masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perbuatan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga miskin.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset produktif, sehingga semakin lama menjadi semakin tertinggal. Dalam prosesnya,

gejala tersebut memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan.

2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan

Suatu kondisi kemiskinan dapat mendorong tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang menentang nilai-nilai kemanusiaan. Sudah tentu mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan (*the have nots*) akan membangun atau membentuk nilai-nilai tersendiri yang khas dan tidak sama dengan golongan lain di atasnya. Sebagai contoh, kebiasaan kaum miskin hidup dalam kekurangan membuat cara hidup mereka tidak bisa memiliki kadar kebersihan sebagaimana golongan atas, hal ini disebabkan oleh (Syaripulloh, 2012

- a. Dari segi waktu, mereka kebanyakan tidak cukup punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain diluar usaha mencari sesuap nasi
- b. Dari segi ketersediaan fasilitas, memang tidak memungkinkan suasana yang bersih. Bagaimana orang yang tinggal dikolong jembatan atau dipinggir kali dapat memiliki punya tradisi bersih (menjaga kebersihan) apabila kondisi lingkungannya lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tinggal dirumah yang mapan. Selain itu, cara komunikasi mereka yang biasa tinggal dalam hiruk pikuk jalan, kebisingan yang tinggi, tentu saja akan terbiasa bersuara keras (volume suara). Dapatkah tradisi ini diterima? Apakah dapat diterima oleh norma-norma kesopanan dan etiket golongan elit?

Jika nilai-nilai dari golongan atas digunakan sebagai titik pijakan dan ukuran dalam menilai tingkat realisasi kemanusiaan, maka dengan sendirinya mereka yang bergelimang dalam kemiskinan dapat dikatakan hidup dalam kondisi kemanusiaan yang rendah. Sebagai contoh antara lain seperti (Syaripulloh, 2012)

- a. Ditempat-tempat pembuangan sampah, serombongan manusia saling berebut barang (sampah) yang baru diturunkan dari truk pengangkut.
- b. Pagi hari ketika kereta api masuk stasiun, anak-anak gelandangan saling berebut makanan bekas, sisa-sisa makanan dari para penumpang.
- c. Pemulung yang masih bersedia memakan makanan bekas yang sudah ada di tempat sampah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan menjadi kenyataan yang tidak memungkinkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia tumbuh secara wajar. Masih adanya kemiskinan dengan sendirinya memberikan bukti bahwa keadaan kemanusiaan masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, pembicaraan mengenai martabat (kemuliaan) manusia hanya sebatas bagi mereka yang dalam posisi mapan, tetapi belum menyentuh pada mereka yang dihinakan karena hidup dalam kemiskinan dan menderita.

2.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers (1998) memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidak berdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan

negatif secara politik, dan terutama ketidak berdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multi dimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti inidapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karenarendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi padasuatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukungadanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini jugaterkadang memiliki unsur diskriminatif.

2.2.1 Bentuk Kemiskinan Berdasarkan Sifat

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004).

Menurut Chambers (1998) dalam Chriswardani (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi sebagai ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain:

a. Kemiskinan (*proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidak mampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan- kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

b. Ketidak berdayaan (*powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*socialpower*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan di anggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

d. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi dipusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti diperkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Dapat diketahui setiap ada permasalahan yang terjadi disekeliling kita pasti ada faktor faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Begitu juga dengan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Ini lah faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang ada di Indonesia.

2.3.1 Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Dalam konteks ini penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Teori yang dapat dijadikan pijakan yang mendukung bahwa tingkat pendidikan termasuk didalamnya pengetahuan, ketrampilan serta informasi dapat dijadikan salah satu faktor yang menentukan kemiskinan. Pendapat-pendapat itu dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1 Sintesis Faktor Tingkat Pendidikan

Tokoh	Pernyataan
Friedmann, 1979	Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak samaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dan
Ala, 1981	Nilai-nilai ini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar
Adler Karlsson,	Pendidikan juga harus termasuk dalam pengukuran
World Bank, 1980	Beberapa aspek kemiskinan yaitu: pendidikan yang
Hendratta, 1979	Suatu penelitian dalam masyarakat akan menunjukkan ruwet dan kompleksnya hubungan diantara berbagai
Ala, 1981	Terdapat ada 10 macam nilai, sehingga dengan demikian terdapat sepuluh dimensi atau aspek kemiskinan, yakni:
Salim, 1980	Orang miskin memiliki lima ciri tingkat pendidikan

Sumber: Hasil Identifikasi, 2021

2.3.2 Terbatasnya Lapangan Pekerjaan

Penyebab kemiskinan yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerjabaru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Dasar-dasar teori faktor pekerjaan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

2.3.3 Malas Bekerja

Penyebab kemiskinan yang ketiga adalah malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang

2.3.4 Beban Hidup Keluarga

Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya.

2.3.5 Keterbatasan Sumber Daya (Alam Maupun Modal)

Suatu masyarakat bisanya akan dilanda kemiskinan salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing masing orang. Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur maupun kondisi psikologis orang orang yang terdampak mengalami kerusakan. Kadang hal tersebut dapat diatasi dan kadang bahkan tidak ada yang bisa berbuat apa apa. Untuk mengatasi kerusakan kerusakan tersebut biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, dari bencana alam, banyak orang orang yang kehilangan harta bendanya, sehingga langsung jatuh miskin setelah itu. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang. Apalagi untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tidak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan atau

pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi penyebab kemiskinan yang juga cukup serius.

2.4 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan sebab terjadinya kemiskinan diperkotaan dapat diukur dengan adanya indikator-indikator kemiskinan maka indikator utama kemiskinan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

BAPPENAS (Harniati, 2010). Merumuskan indikator kemiskinan yang konkrit. Yakni indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

- a. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- b. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
- c. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.

- d. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
- e. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
- f. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
- g. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
- h. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
- i. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.

- j. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
- k. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Berdasarkan pendapat diatas, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Utama Kemiskinan

Ekonomi rendah	• Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. • Terbatasnya kesempatan kerja dan
Terbatasnya sarana dan prasarana	• Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. • Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. • Terbatasnya akses layanan perumahan
Terbatasnya perlindungan sosial dan politik	• Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah. • Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. • Lemahnya jaminan rasa aman.

Sumber: Hasil Identifikasi, 2021

2.5 Pengertian Penanganan Kemiskinan

Adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Langkah-langkah, seperti yang dipromosikan oleh George (1881) dalam ekonomi klasiknya *Progress and Poverty*, adalah langkah-langkah yang meningkatkan, atau dimaksudkan untuk meningkatkan, cara-cara yang memungkinkan orang miskin untuk menciptakan kekayaan bagi diri mereka sendiri sebagai cara untuk mengakhiri kemiskinan selamanya.

Di zaman modern berbagai ekonomi dalam gerakan Georgisme mengusulkan langkah-langkah seperti pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan akses ke alam untuk semua. Kemiskinan terjadi di negara berkembang dan negara maju. Sementara kemiskinan jauh lebih luas di negara-negara berkembang, kedua jenis negara melakukan langkah-langkah penanganan kemiskinan. Secara historis, kemiskinan di beberapa bagian dunia tak terhindarkan dengan ekonomi non-industri menghasilkan sangat sedikit, sementara populasi tumbuh begitu secepat, membuat kekayaan menjadi langka

2.6 Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

2.6.1 Strategi Penanganan Kemiskinan

Strategi Penanganan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu:

- a. penyediaan kebutuhan pokok
- b. pengembangan sistem jaminan sosial
- c. pengembangan budaya usaha.

Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program penanganan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya.

Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu:

- a. perencanaan sebagai reformasi sosial (*social reform*), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat
- b. perencanaan sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat
- c. perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*social learning*), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (*learning by doing*), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli
- d. perencanaan sebagai mobilisasi sosial (*social mobilization*), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

2.6.2 Program Penanganan Kemiskinan

Sedangkan jenis-jenis program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut. Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam empat model pembangunan yaitu (Munwar, 2014)

- a. menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan nasional.
- b. menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok/dasar.
- c. berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan. Sedangkan
- d. menitik beratkan pada peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah.

Evaluasi terhadap program penanganan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanganan kemiskinan meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran, peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima sasaran program, dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat.

Adapun Selama ini kebijakan dan program penanganan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut antara lain adalah. (Munwar, 2014)

- a. Kredit Investasi Kecil (KIK)
- b. Kredit Usaha Tani (KUT)
- c. Kredit Modal Permanen (KMP)
- d. Kredit Usaha Kecil (KUK)
- e. Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Program penanganan kemiskinan yang paling serius adalah program IDT di sepertiga desa di Indonesia dan program Takesra/Kukesra di dua pertiga desa lainnya

Selain itu, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan N0. 1232/1989, BUMN diwajibkan menyisihkan 1-5% dari labanya untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi. Program-program pemberdayaan bagi penduduk miskin yang lain yaitu:

- a. Program Pembinaan dan peningkatan Petani dan Nelayan Kecil(P4K),
- b. Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP)
- d. Program Pembangunan Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)

Upaya penanganan kemiskinan terus dilakukan pemerintah. pada tahun 2002 dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan(KPK) melalui Keputusan Presiden RI No. 124/2001 Keppres RI No-8/2002 Keppres RI No. 34/2002. Komite ini melibatkan berbagai aktor, yaitu: akademisi, LSM, pelaku usaha, birokrasi daerah, onnas/orsospol, dan lembaga keuangan bank dan non bank. KPK dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan yang didasarkan atas pemberdayaan masyarakat.

2.7 Analisis SWOT

Teknik analisis SWOT biasanya diterapkan dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan, khususnya untuk membuat Rencana Strategis atau (Renstra). Teknik perencanaan ini menjadi populer untuk digunakan karena dapat digunakan untuk membuahakan suatu strategi pembangunan yang lebih terarah dan selaras dengan potensi yang ada di daerah atau institusi tertentu. Di samping itu, dengan menerapkan teknik analisis SWOT akan membuahakan hasil program dan kegiatan yang lebih sesuai untuk mengambil peluang dari luar untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi dari dalam. Dengan demikian penggunaan analisis SWOT bisa mewujudkan analisis strategi yang lebih konkret dan realistis yang mana selaras dengan kondisi dan situasi yang terjadi di daerah atau institusi tertentu. Tidak mengherankan jika teknik analisis SWOT menjadi populer dikalangan aparat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimana digunakan untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan.

Analisis SWOT dasarnya merupakan metode atau teknik untuk mengenali apa saja faktor dan juga unsur yang digunakan untuk menentukan pembangunan didalam institusi terkait dengan secara sistematis. Teknik analisis SWOT memiliki tujuan dalam melaksanakan evaluasi terhadap kondisi lingkup kegiatan yang dilakukan pada instansi terkait yang kemudian dapat diimplikasikan untuk merencanakan strategi pembangunan dengan tepat dan selaras dengan keadaan dan potensi institusi yang berhubungan. Dalam pengaplikasiannya, institusi yang dimaksud disini misalnya seperti perusahaan,

organisasi dan instansi pemerintah. Analisis SWOT ini ditentukan berdasar pada kondisi umum institusi yang berhubungan baik yang bersifat eksternal maupun internal dimana untuk menggapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pengambil keputusan. Istilah SWOT ini ialah singkatan dari empat kata, yaitu: *Strength* atau kekuatan, *Weaknesses* atau kelemahan, *Opportunities* atau peluang, dan *Threat* atau ancaman. Keempat unsur ini ialah aspek krusial yang perlu dibahas untuk mengetahui keadaan dan masalah yang dihadapi oleh suatu daerah atau institusi tertentu. Adapun penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Strength* (kekuatan) ialah kelebihan yang ada pada suatu daerah atau institusi yang tidak dimiliki oleh daerah atau institusi lainnya. Dalam analisis keadaan ekonomi daerah, kekuatan tersebut bisa timbul dalam wujud tingkat kesuburan tanah yang lebih gembur, potensi sumber daya alam yang lebih besar dan bernilai tinggi, kualitas pendidikan yang lebih baik, kondisi keuangan yang lebih mapan dan lain-lainnya. Analisis akan lebih menjadi konkret dan meyakinkan bilamana semua unsur kekuatan ini dapat dibuktikan secara kuantitatif dengan menerapkan indikator dan data pendukung tertentu.
2. *Weaknesses* (kelemahan) pada dasarnya ialah kekurangan atau kelemahan yang ada pada suatu daerah atau institusi tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah atau institusi lainnya. Dalam analisis kondisi sosial ekonomi, unsur kelemahan ini pada dasarnya merupakan lawan

dari unsur kekuatan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kelemahan bisa timbul dalam bentuk tingkat kegemburan lahan yang relatif rendah, potensi sumber daya alam yang relatif kecil dan terbatas, posisi daerah yang kurang menguntungkan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Mengenai kelemahan ini akan lebih menjadi konkrit apabila disokong dengan data serta informasi yang akurat dan juga bersifat kuantitatif atau terukur.

3. *Opportunities* (peluang) dijabarkan sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan bisa dipergunakan untuk mendorong proses pembangunan daerah atau institusi bersangkutan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya

bahwa peluang ini ialah unsur yang datang dari luar (eksternal), baik dari ekonomi, sosial dan kebijakan, dan aturan pemerintah atau karena adanya perubahan teknologi baru. Dari segi sosial ekonomi, peluang tersebut dapat timbul dalam wujud adanya minat masyarakat yang cukup tinggi pada salah satu atau beberapa unsur pembangunan daerah, meningkatnya daya beli masyarakat, dengan adanya kebijakan dan aturan baru pemerintah yang bisa menciptakan kesempatan terjadi suatu pengembangan akibat karena terdapat perubahan teknologi dan ditemukannya produk baru yang dapat menyokong proses pembangunan daerah atau institusi terkait sama dengan hal yang dulu, analisis akan lebih menjadi konkrit dan juga apabila semua unsur peluang tersebut bisa ditimbulkan dengan data

dan juga informasi yang kuantitatif akan menjadi lebih terukur.

4. *Threat* (Ancaman) merupakan keadaan atau masalah yang datang dari luar dan bisa mengakibatkan kesulitan atau masalah serta hambatan atau tantangan yang cukup serius untuk suatu daerah atau institusi. Ancaman dapat muncul lalu mengakibatkan adanya kemajuan dan mengubah kondisi sosial ekonomi, dimana kebijakan dan aturan yang berubah terjadi karena terdapat berubahnya pandangan dan juga kemajuan teknologi atau kondisi ketertiban dan keamanan yang dapat menimbulkan bahaya pada proses pembangunan atau perubahan pada persepsi masyarakat dan juga pada kemajuan teknologi informasi yang dapat memunculkan ancaman dari luar untuk suatu daerah atau institusi bersangkutan (Sjafrizal, 2015).

Teknik analisis SWOT ternyata sudah banyak dikenal dan bahkan cukup populer sebagai salah satu teknik praktis yang dapat digunakan oleh para pengusaha dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Kemudian teknik SWOT menjadi sangat populer juga di dalam penyusunan RPJMD suatu daerah dan Renstra untuk dinas dan instansi pemerintah terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Secara khusus ada dua kegunaan utama jika menerapkan teknik analisis SWOT dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pertama, dengan menerapkan teknik analisis SWOT maka pembahasan mengenai keadaan daerah secara umum atau suatu instansi baik menyangkut kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang akan

menjadi lebih tajam dan juga terarah. Perumusan perencanaan, baik untuk strategi, kebijakan, dan program pembangunan akan lebih menjadi tepat, konkrit, dan terarah jika analisis tentang keadaan daerah secara umum tersebut dapat dijalankan dengan metode yang lebih baik dan juga tajam.

Kedua, rumus strategi pembangunan daerah akan lebih menjadi lebih tajam dan juga terarah selaras dengan potensi serta keadaan yang terdapat di daerah dan institusi terkait. Yang memungkinkan keberhasilan peangaplikasian strategi pembangunan daerah terkait akan menjadi lebih besar. Hal ini akan sangat krusial jika strategi pembangunan yang dicanangkan hanya berdasarkan secara umum dan tidak selaras dengan potensi yang terdapat di daerah, maka kemungkinan tercapainya target pembangunan daerah tersebut menjadi kecil atau gagal.

Meskipun teknik analisis SWOT ini sangat populer tetapi tidak dapat dibantah jika teknik ini pun memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Kekurangan pertama yang ada didalam analisis SWOT ialah tingkat subjektivitas perencana yang tinggi dalam menjalankan analisis. Hal ini begitu kentara dalam menetapkan unsur-unsur pada analisis SWOT seperti kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Oppurtunities*), dan ancaman (*Threats*). Maka dari itu diperlukanlah hal yang dapat meninggikan objektivitas dari analisis SWOT ini dan seyogyanya analisis tersebut disokong juga dengan mempergunakan data-data kuantitatif terutama didalam menetapkan unsur kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman.

2. Kelemahannya dari teknik analisis SWOT masih belum bisa diimplikasikan secara terhubung dan juga sistematis dengan pencaangan anggaran yang memerlukan hal yang harus terhubung dan sistematis dengan mempergunakan pencaangan anggaran yang dikeluarkan untuk memanifestasi strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang telah dicanangkan. Teknik analisis yang juga menerapkan SWOT, tapi terhubung langsung dengan aspek penganggaran yaitu ialah teknik Balance Score-card yang dijabarkan oleh Mulyadi (Sjafrizal, 2015).

Teknik analisis SWOT ini menggunakan faktor internal dan eksternal yang kemudian dilaksanakan dengan menerapkan analisis dan evaluasi untuk mengungkap apa saja kelemahan dan kekuatan dalam strategi tersebut dan juga mengevaluasi kesempatan dan kendala yang dihadapi didalam melakukan suatu tugas. Kondisi lingkungan dalam berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari institusi terkait sedangkan keadaan lingkungan luar berkorelasi dengan kesempatan dan hambatan yang bisa datang dari luar instansi. Kemudian untuk dapat memecah isu dalam peta atau faktor strategi yang dapat diterapkan berikut analisis SWOT dalam bentuk tabel matrik

Tabel 2.3 Matrik Analisis SWOT untuk Perumusan Strategi

Internal Eksternal	Strengths (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki organisasi atau institusi.	Weaknesses (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki organisasi atau institusi.
	Opportunities (O) Hasil identifikasi dari semua peluang yang ada dari luar institusi	Strategi (SO) Menerapkan semua kekuatan yang dimiliki dan juga memanfaatkan semua peluang yang ada.
	Threat (T) Hasil identifikasi semua ancaman yang berasal dari luar institusi	Strategi (WO) mengatasi semua kelemahan dari dalam dengan memanfaatkan semua peluang yang ada.
		Strategi (ST) menerapkan semua kekuatan dari dalam untuk menghindari pelbagai ancaman. Dari luar
		Strategi (WT) Tangani semua kelemahan dari dalam dan cegah semua ancaman yang datang dari luar

Seperti dikutip dalam (Fahmi, 2015) ada beberapa strategi yang bisa didapat dan digunakan dari teknik Analisis SWOT sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) yaitu startegi dengan cara memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang ada dalam institusi untuk bisa mendapatkan kesempatan/menentukan perpaduan

kekuatan dan peluang yang bisa mempergunakan kekuatan yang ada untuk mendapatkan strategi dengan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya.

2. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) yaitu, strategi dengan cara mengurangi kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada institusi itu sendiri yang kemudian digunakan untuk bisa merebut kesempatan yang terdapat di lingkungan luar atau eksternal dengan memanfaatkan kesempatan yang bisa memberi keuntungan.
3. Strategi ST (*Strength-Threat*) ialah strategi yang memberdayakan kekuatan atau kelebihan yang berasal dari dalam institusi dimana digunakan untuk melenyapkan ancaman dari luar atau menghadapi ancaman yang berasal dari luar instansi tersebut.
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*) ialah strategi dengan cara menghadapi kelemahan yang terletak di internal atau institusi itu sendiri untuk mengecilkan kelemahan yang ada guna menyingkar dari ancaman yang akan datang berasal dari eksternal atau dari luar instansi.

2.8 Sintesa Teori

Sintesa teori akan dilakukan melalui sintesa teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Sintesa teori yang dilakukan merupakan penggabungan dari berbagai teori sehingga didapat poin-poin yang berhubungan dengan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.2 Sintesa Teori

No	Teori	Sumber	Keterangan / Indikator
1	Defenisi Kemiskinan	World Bank, 1990	Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multi dimensional. Pendekatan yang dilakukan dengan satu bidang ilmu tertentu belum cukup untuk menjelaskan makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah definisi kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum
2	Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan		Tingkat pendidikan yang rendah Terbatasnya lapangan pekerjaan Malas bekerja Beban hidup keluarga Keterbatasan sumber daya (alam maupun manusia dan modal)

3	Indikator Kemiskinan	Bappenas 2010	1. Keterbatasan pangan. 2. Keterbatasan akses kesehatan. 3. Keterbatasan akses pendidikan 4. Keterbatasan akses pada pekerjaan 5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi 6. Keterbatasan akses terhadap air bersih 7. Keterbatasan akses terhadap tanah 8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam 9. Tidak adanya jaminan rasa aman 10. Keterbatasan akses untuk partisipasi 11. Besarnya baban kependudukan
4	Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan	John Friedmann 1979	1 Perencanaan sebagai reformasi social (<i>social reform</i>) 2 Perencanaan sebagai analisis kebijakan (<i>policy analysis</i>) - Perencanaan sebagai pembelajaran social (<i>social learning</i>) 4 Perencanaan sebagai mobilitas social (<i>social mobilization</i>)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

2.9 Penelitian Terdahulu

Keaslian Penelitian merupakan suatu syarat sebagai keabsahan suatu karya ilmiah yang dapat ditinjau dari ide dasar penelitian dan perbandingan penelitian dengan penelitian yang sejenis lainnya. Adapun keabsahan penelitian tentang “Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir” dapat dilihat melalui beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Restu Sita Harsiwi dan Jawoto Sih Setyono (2015)	Tingkat kerentanan ekonomi wilayah kabupaten wonogiri	Kabupaten Wonogiri	- pertumbuhan ekonomi - faktor kemiskinan	metode survei	1. Kabupaten Wonogiri tergolong dalam Kabupaten yang tergolong rentan tinggi apabila dilihat dari segi perekonomian 2. Dari 4 faktor dominan yang mempengaruhi kerentanan ekonomi wilayah Kabupaten Wonogiri, Faktor Kemampuan Produksi Barang Dan Jasa memberikan kontribusi paling besar dalam mempengaruhi Tingkat Kerentanan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, yaitu 29,91%. Tingginya kontribusi Faktor Kemampuan Produksi Barang Dan Jasa menunjukkan bahwa hasil produksi barang, jasa dan hasil produksi pertanian perkebunan menjadi aspek penting dalam mempengaruhi Tingkat Kerentanan Ekonomi.
2	Mita Natalia dan Muhammad Mukti Alie (2014)	Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok)	Kampung Nelayan Tambak Lorok	- kualitas sumber daya manusia - kondisi infrastruktur - kepemilikan modal dan teknologi	Metode Kualitatif	Kemiskinan yang terjadi di kampung nelayan tambak lorok disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya kepemilikan modal usaha dan teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dengan rendahnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat yaitu Sekolah Dasar (SD) dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat Tambak Lorok. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan masyarakat Tambak Lorok tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh bidang kerja yang lebih luas.
3	Amelia Renggapratiwi (2009)	Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik Dan Respon Kebijakan	Kota Semarang	Karakteristik kemiskinan	Metode Kualitatif	Respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah.

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
4	Arick Bagus Prasetia (2019)	Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tambang	Kabupaten Kampar	• Kesehatan • Pendidikan • Standar Hidup • Sosial Ekonomi • Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Deskriptif Kuantitatif	Mengenai karakteristik kemiskinan berupa kesehatan, pendidikan dan standar hidup masih dijumpai beberapa masalah. Untuk kesehatan, penolong persalinan di Kecamatan Tambang sudah dibilang cukup terfasilitasi, partisipasi vaksinasi di Kecamatan Tambang cukup tinggi namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak peduli terhadap penting nya program vaksinasi, dan untuk jaminan kesehatan program Kartu indoneia sehat yang diperuntukan untuk masyarakat miskin sudah berjalan walaupun masih ada beberapa masalah. Dari segi pendidikan angka partisipasi sekolah untuk anak usia sekolah terkini cukup tinggi, namun masih ada bebrapa anak yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Yang menjadi masalah didalam pendidikan ialah rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, terutama masyarakat miskin. Dan untuk standar hidup berupa sanitasi, air minum, jaringan listrik dan kondisi rumah di Kecamatan Tambang masih mengalami berbagai masalah yang cukup signifikan .
5	Gatot Winoto (2006)	Pola Kemiskinan Di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	• Indikasi Kemiskinan • Pola Kemiskinan • Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	Metode Kualitatif	(a) kemiskinan sub-sistensi, dicirikan oleh pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih; (b) kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi) dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah faktor ekonomi, Sosial, dan faktor pendidikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat dalam suatu penelitian, ataupun merupakan acuan pelaksanaan penelitian yang meliputi kebutuhan data, teknik pengolahan, dan teknik analisis yang digunakan. Prosedur ini memberikan kepada penelitian urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian serta memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

Dalam Metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses penelitian yang bersifat deduktif dengan metode penelitian kuantitatif atau metode deskriptif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian (Sugiyono 2013).

Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Untuk mengumpulkan data digunakan instrument penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial (Sugiyono, 2012).

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa kuisioner, observasi lapangan dan dokumentasi gambar. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah angket dan instrument yang telah tersandar. Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data terkait. Observasi lapangan untuk mendapatkan informasi langsung terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan. Dokumentasi gambar dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata.

3.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan setelah seminar proposal penelitian yakni 15 September - 15 Oktober 2021. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder, pengolahan data, analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian hingga seminar hasil penelitian

Dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini digunakan beberapa bahan dan alat penelitian yang harus disediakan untuk langkah awal dari kegiatan penelitian diantaranya:

- a. Kamera, yang akan digunakan untuk mendokumentasi data hasil pengamatan.
- b. Alat tulis seperti pena atau pensil, yang akan digunakan untuk mencatat dan menulis data.
- c. Komputer yang digunakan untuk mengolah data.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan lengkap. Adapun jenis data yang diperlukan terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari hasil observasi lapangan (Sangadji, 2010), seperti yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan observasi langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif obyek studi. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Pengumpulan data primer dapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misal diambil dari surat kabar dan majalah ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah disusun dalam arsip yang didokumentasikan maupun tidak didokumentasikan.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait sebagai berikut, yaitu:

- a. Kondisi penduduk miskin, kondisi sarana prasarana ekonomi, yang bersumber dari tokoh-tokoh masyarakat dan sebaran kuisisioner.

- b. Data kemiskinan, seperti jumlah KK, tingkat perceraian, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang bersumber dari pengamatan observasi.
- c. Data BDT, data kependudukan Kecamatan Batu Hampar diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hiir.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pencatatan peristiwa-pristiwa atau kejadian kejadian atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang berkaitan dalam penelitian yang akan menjadi penunjang atau pendukung penelitian. maka teknik yang digunakan ada 2 teknik yaitu:

3.4.1 Data Primer

a. Kuesioner

Suroyoanwar (2009), angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan langsung atau pertanyaan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Menurut Gantina Komalasari, dkk (2011) kuesioner sebagai suatu alat pengumpulan data dalam *assessment non test*, berupa serangkaian yang diajukan kepada responden (peserta didik, orang tua atau masyarakat).

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). Menurut Hanna Djumhana, pengertian observasi adalah suatu metode ilmiah yang paling utama dalam ilmu pengetahuan *empiris* serta masih dapat pengakuan dari dunia penelitian karya ilmiah sebagai metode yang sering digunakan dalam melakukan pengumpulan data

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencatat dan menyampaikan dokumen menggunakan alat bukti yang akurat yang berkaitan dengan yang diteliti melalui sumber-sumber informasi khusus untuk mendapatkan keterangan dan penerangan. Dokumentasi dalam penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data-data deskriptif objek penelitian. Studi dokumentasi menurut Hasan (2002) dalam Iswandi (2016) adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi dalam penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan data-data deskriptif objek penelitian.

3.4.2 Data Sekunder

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder, dilakukan *survey* yang meliputi:

- a. Studi pustaka, dilakukan melalui studi pustaka buku-buku, hasil penelitian dan peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. *Survey* instansi, bertujuan mencari data data pendukung yang berhubungan dengan tema penelitian

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

No.	Jenis Data	Tahun	Sumber	Media Observasi
1	Pengamatan Langsung atau Observasi	2021	Data primer	Foto, penyebaran kuesioner dan observasi
2	Dokumentasi	2021	Data primer	Foto, penyebaran kuesioner dan observasi
3	Studi Pustaka	2021	Data Sekunder	Pendapat ahli instansi pemerintah dan lainnya seperti jurnal, skripsi, buku-buku
4	Kuesioner	2021	Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar	Foto, penyebaran kuesioner dan observasi

Sumber : Hasil Identifikasi, 2021

3.5 Populasi dan Teknik Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Arikunto (2002), pengertian populasi adalah objek yang secara keseluruhan digunakan untuk penelitian. Jadi apabila ada seseorang yang hendak meneliti semua karakteristik dan elemen dalam suatu wilayah penelitian, tentu saja penelitian tersebut termasuk dalam penelitian populasi. Sedangkan Ismiyanto berpendapat bahwa populasi adalah totalitas atau keseluruhan subjek penelitian baik benda, orang, ataupun suatu hal lain yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian. Pengertian populasi dan sampel juga dijelaskan oleh Nursalam (2003). Beliau menjelaskan bahwa populasi merupakan suatu keseluruhan dari variabel penting yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Batu Hampar. Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan miskin di Kecamatan Batu Hampar sebanyak 307 jiwa 32% dari jumlah penduduk sebanyak 9.564 jiwa (Dinas Sosial Rohil 2017)

3.5.2 Teknik Sampel

Teknik sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu (Sugiyono, 2012). Pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya. Dalam penelitian ini ada dua cara yang dilakukan dalam pengumpulan data atau pengambilan data diantaranya survei kelapangan secara langsung ke wilayah penelitian, dan melalui kuesioner yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini yang menjadi

sampel adalah Masyarakat yang ada di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode *probability sampling*, dimana metode ini lebih tepat digunakan dalam kajian ini. Dengan asumsi semua elemen mempunyai peluang terpilih menjadi sampel. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode *Teknik Random Sampling*, teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi.

Secara umum, jumlah ukuran sampel yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus Slovin (Sevilla et.al, 1993 dalam Sugiyono, 2009) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau di inginkan adalah 10%

Berdasarkan rumus diatas, ukuran sampel yang dianggap sudah dapat mewakili populasi dengan menggunakan derajat kepercayaan 10% tingkat ketelitian kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia (Sugiyono 2016). Jumlah penduduk di Kecamatan

Batu Hampar berjumlah 9.564 (BPS, 2017) maka jumlah sampel yang *diambil* adalah



$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{9.564}{1 + 9.564 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{9.564}{1 + 9.564 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{9.564}{1 + 9.564 (0,01)}$$

$$n = \frac{59.775}{604}$$

$$n = 100$$

Hasil sampel yang di dapatkan menggunakan rumus Slovin berjumlah 100 jiwa jika

Tabel 3.2 Distribusi Sampel Perdesa

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Sampel
1	Bantayan	2.512	25
2	Bantayan Baru	2.121	21
3	Bantayan Hilir	2.210	22
4	Sungai Sialang Hulu	1.511	17
5	Sungai Sialang	1.210	15
	JUMLAH	9.564	100

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai akademis, dan ilmiah. Analisis data juga bisa dikatakan sebagai sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan. Berdasarkan jenis penelitian serta data-data yang akan dibutuhkan dan diamati, analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan/melukiskan keadaan komponen penelitian di suatu kawasan. Data yang dideskriptifkan adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan pengamatan atau survei, dan kuesioner. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan agar data yang diperoleh dapat lebih akurat dalam penggunaan data

sebagai acuan penelitian. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau data sekunder dan observasi lapangan.

Metode analisis data sangat mempengaruhi hasil penelitian, jika metode yang digunakan sesuai dengan objek penelitian, maka hasilnya akan dapat diterima, sedangkan jika tidak sesuai, maka penelitian itu dianggap gagal, oleh karena itu ketika melakukan sebuah penelitian harus mempertimbangkan objek penelitian dan menentukan metode yang akan digunakan dalam analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diurutkan berdasarkan dengan tujuan dan sasaran penelitian, yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik, biasanya analisis ini terbagi kedalam dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umumnya atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskriptif semata dalam arti tidak mencari atau

menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan.

Tanpa adanya analisis data, maka kesahihan sebuah penelitian masih diragukan. Karena dengan analisis di telaah penelitian itu akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk mencapai tujuan penelitian yaitu menangani kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka metode analisis yang akan digunakan yaitu analisis kuantitatif deskriptif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di urutan berdasarkan dengan tujuan dan sasaran penelitian, adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian, yakni:

3.6.2 Karakteristik Kemiskinan

Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar proses analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar. Dimana berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Bappenas maka beberapa jenis karakteristik kemiskinan seperti kesehatan, (penolong pesalinan, vaksinasi, jaminan kesehatan), pendidikan (partisipasi sekolah, tahun sekolah, buta huruf), dan standar hidup (sanitasi, air minum, listrik, bahan bakar memasak, kondisi rumah, kepemilikan rumah, kepemilikan telepon) memberi acuan dalam

memberikan gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan, dengan itu dilakukan proses analisis dengan mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di lokasi penelitian. Karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar menggunakan skala likert.

Rensis Likert telah mengembangkan sebuah skala untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932 yang sekarang terkenal dengan nama Skala Likert. Djaali (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam Skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Ada dua bentuk pertanyaan yang menggunakan Likert yaitu pertanyaan positif untuk mengukur minat positif, dan 13 bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur minat negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1,

sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban Skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Penskalaan ini apabila dikaitkan dengan jenis data yang dihasilkan adalah data Ordinal. Selain pilihan dengan lima skala tersebut, kadang digunakan juga skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner Skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" tak tersedia. Jenis data ada empat NOIR (Nominal, Ordinal, Interval, Rasio) keempat jenis data ini memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Nominal: Bersifat mengklasifikasikan saja, tanpa ada jenjang di antara klasifikasi.
- b. Ordinal: Bersifat mengklasifikasikan, dan klasifikasi tersebut sudah merupakan tingkatan.
- c. Interval: Bersifat mengklasifikasikan, dan klasifikasi tersebut sudah

merupakan tingkatan yang masing-masing tingkatan memiliki jarak yang sama.

d. Rasio: ini adalah data dengan tingkatan yang tertinggi karena telah memiliki angka nol mutlak.

Misal ukuran panjang atau tinggi, dan ukuran berat. Mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar di lakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar. Mengetahui akan karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skla likert*,

Y = Skor Tertinggi Likert x jumlah Responden

$$= 5 \times 100$$

$$= 500$$

X = Skor Terendah Likert x Jumla Responden

$$= 1 \times 100$$

$$= 100$$

Interval = 100 / Jumlah Skor Likert

$$= 100 / 500$$

$$= 20$$

Tabel 3.3 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

No	Interprestasi Skor	Keterangan
1	0 % - 19,99 %	Sangat (Buruk/Kurang Sekali)
2	20 % - 39,99 %	Tidak Setuju/Kurang Setuju
3	40 % - 59,99 %	Cukup/Netral/Agak
4	60 % - 79,99 %	Setuju/Baik/Suka
5	80 % - 100 %	Sangat (Setuju/Baik/Suka)

Sumber: Nazir, 2009

3.6.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat miskin dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Rensis Likert telah mengembangkan sebuah skala untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932 yang sekarang terkenal dengan nama Skala Likert. Djaali (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam Skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Ada dua bentuk pertanyaan yang menggunakan Likert yaitu pertanyaan positif untuk mengukur minat positif, dan 13 bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur minat negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban Skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Penskalaan ini apabila dikaitkan dengan jenis data yang dihasilkan adalah data Ordinal. Selain pilihan dengan lima skala tersebut, kadang digunakan juga skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner Skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" tak tersedia. Jenis data ada empat NOIR (Nominal, Ordinal, Interval, Rasio) keempat jenis data ini memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Nominal: Bersifat mengklasifikasikan saja, tanpa ada jenjang di antara klasifikasi.
- b. Ordinal: Bersifat mengklasifikasikan, dan klasifikasi tersebut sudah merupakan tingkatan.
- c. Interval: Bersifat mengklasifikasikan, dan klasifikasi tersebut sudah merupakan tingkatan yang masing-masing tingkatan memiliki jarak yang sama.
- d. Rasio: ini adalah data dengan tingkatan yang tertinggi karena telah memiliki angka nol mutlak.

Misal ukuran panjang atau tinggi, dan ukuran berat. Mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar di lakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Batu

Hampar. Mengetahui akan karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skla likert*,

Y = Skor Tertinggi Likert x jumlah Responden

$$= 5 \times 100$$

$$= 500$$

X = Skor Terendah Likert x Jumla Responden

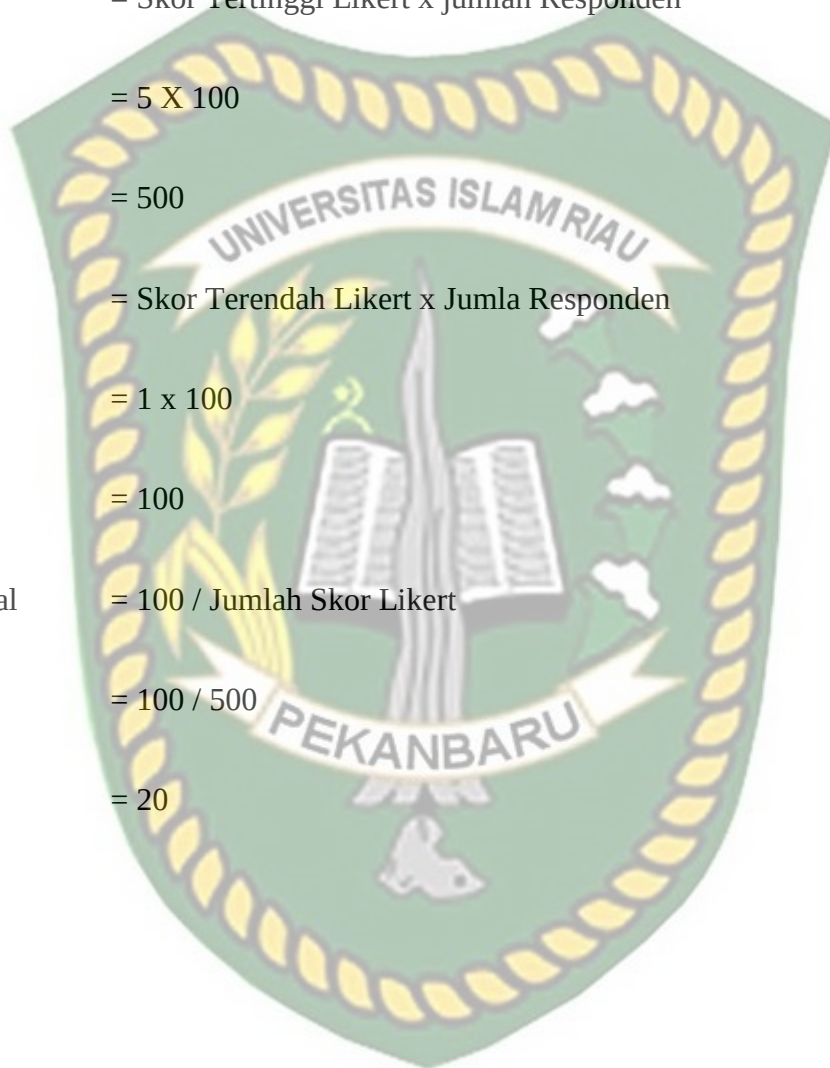
$$= 1 \times 100$$

$$= 100$$

Interval = 100 / Jumlah Skor Likert

$$= 100 / 500$$

$$= 20$$



Tabel 3.4 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

No	Interprestasi Skor	Keterangan
1	0 % - 19,99 %	Sangat (Buruk/Kurang Sekali)
2	20 % - 39,99 %	Tidak Setuju/Kurang Setuju
3	40 % - 59,99 %	Cukup/Netral/Agak
4	60 % - 79,99 %	Setuju/Baik/Suka
5	80 % - 100 %	Sangat (Setuju/Baik/Suka

Sumber: Nazir, 2009

3.6.4 Strategi Penanganan Kemiskinan

Dalam menyusun rancangan program, perlu terlebih dahulu dianalisis dan ditetapkan masalah prioritas. Setelah itu ditetapkan suatu strategi pengembangan dan penanganan, Metode Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, and Treath Analysis) merupakan alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategi, yang lazim disebut sebagai lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal, yang terdiri atas empat elemen berupa kekuatan (Strenght) dan Kelemahan (Weakness) dalam lingkungan internal serta peluang (Opportunity) dan ancaman (Treath) dalam lingkungan eksterna

SWOT dengan pendekatan visi keberhasilan guna mengidentifikasi isu-isu strategisnya. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) (Freddy Rangkuti 1999:18-19). Untuk lebih jelasnya, metode SWOT dapat di lihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Matrik Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Opportunities (O)	Treaths (T)
Faktor Internal		
STRENGTHS (S)	A	B
WEAKNESSES (W)	C	D

Sumber : J. Salusu ,1996 : 357 berdasarkan Kearns, 1992

Langkah – langkah menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi faktor Eksternal (FE) dan faktor Internal (FI) yang terdiri dari peluang dan ancaman (FE) serta kekuatan dan kelemahan (FI).
- Merumuskan faktor-faktor eksternal dan internal guna mendapatkan alternatif strategi.

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana dimana kebijakan akan diturunkan dari strategi penanganan kemiskina yang dihasilkan dalam analisis SWOT. Strategi yang dihasilkan dalam analisis SWOT terlebih dahulu akan dikelompokkan berdasarkan kategori arahan penanganan kemiskinan.

3.7 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) dalam Purnama (2015) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Setelah mengkaji teori dan konsep dari berbagai literature yang ada maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut



Tabel 3.4 Variabel Penelitian

No	Tujuan	Variabel	Indikator
1	Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar	Kesehatan	• Sarana kesehatan dalam penolong persalinan • Alat penolong persalinan • Tenaga kesehatan • Prasarana penolong persalinan (jaringan jalan dan jaringan listrik) • Program KB • Vaksinasi • Jaminan kesehatan • Program BPJS
		Pendidikan	• Program pendidikan • Bantuan pendidikan • Sarana pendidikan • Sumber daya manusia (SDM) • Tingkat partisipasi masyarakat (program pendidikan) • Buta huruf
		Standar hidup	• Program PDAM • Program sanitasi • Listrik • Program rumah layak huni

No	Tujuan	Variabel	Indikator
2	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar	Sosial ekonomi	• Tingkat pendidikan • Pentingnya pendidikan • Rendahnya pendidikan • Pentingnya program wajib 12 tahun • Program pendidikan • Pendapatan penduduk • Keterbatasan modal
3	Untuk merumuskan strategi penanganan Kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar	Strategi penanganan kemiskinan	• Faktor penyebab kemiskinan • Kebijakann dan program • Keterkaitan masyarakat

Sumber: Hasil Identifikasi, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegريان, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1880. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontroleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi dijalur pelayaran internasional Selat Malaka sehingga. Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu gerbang lintas batas perdagangan regional yang cukup penting bagi Provinsi Riau, yaitu dari Selangor-Malaysia maupun ke Sumatera Utara. Berdasarkan Kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis sebelum pemekaran, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 2 dari 6 gerbang lintas batas yang ditetapkan, yaitu. Panipahan dan Sinaboi. Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki keunggulan geografis yang lain sehubungan dengan kedekatan dan aksesibilitasnya yang baik ke Kota Dumai. Dalam PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kota. Dumai telah ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Riau, yang salah satu fungsi utama pelayanannya adalah sebagai pusat kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional, termasuk di dalamnya untuk angkutan CPO dan Migas. Hingga saat ini keberadaan Pelabuhan Dumai sangat membantu dalam proses angkutan CPO yang diproduksi di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini Kabupaten Rokan Hilir menjadi PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dalam katagori II/B yang mengisyaratkan sebagai daerah sentra produksi. Dalam rangka mengoptimalkan keunggulan geografis wilayah yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka diharapkan hal yang lain juga dapat dilakukan dengan peningkatan pelabuhan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

4.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 kecamatan dan 172 desa/kelurahan Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir yaitu. Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Tanjung Medan, Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya, Kubu, Pasir Limau Kapas, Kubu Babusalam, Bangko, Sinaboi, Batu Hampar, Pekaitan, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Jumlah kelurahan dan desa menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir bisa dilihat dari Tabel 4.1 Berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Klarifikasi Wilayah perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

No	Kecamatan	Perkotaan	Desa	Jumlah
1	Tanah Putih	1	17	18
2	Pujud	-	16	16
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	-	6	6
4	Rantau Kopar	-	4	4
5	Tanjung Medan	-	13	13
6	Bagan Sinembah	12	5	17
7	Simpang Kanan	-	6	6
8	Bagan Sinembah Raya	1	12	13
9	Balai Jaya	-	11	11
10	Kubu	-	10	10
11	Pasir Limau Kapas	2	6	8
12	Kubu Babusalam	-	12	12

13	Bangko	6	9	15
14	Sinaboi	-	6	6
15	Batu Hampar	-	5	5
16	Pekaitan	-	10	10
17	Rimba Melintang	-	12	12
18	Bangko Pusako	4	12	16
	Jumlah	26	172	198

Sumber: BPS Rokan Hilir 2017

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1014'-2030' LU dan 100016'-101021' BT. Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 KM2, Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 Kecamatan, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 KM2 dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 KM2. Untuk luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 Berikut:

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Tanah Putih	1915.23	21.56
2	Pujud	984.90	11.09
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	198.39	2.23
4	Rantau Kopar	231.13	2.60
5	Tanjung Medan	-	-
6	Bagan Sinembah	847.35	9,54
7	Simpang Kanan	445.55	5.02
8	Bagan Sinembah Raya	-	-
9	Balai Jaya	-	-
10	Kubu	385.36	4.34
11	Pasir Limau Kapas	669.63	7.54
12	Kubu Babusalam	675.70	7.61
13	Bangko	475.26	5.35
14	Sinaboi	335.48	3.78
15	Batu Hampar	284.31	3.20
16	Pekaitan	465.30	5.24
17	Rimba Melintang	235.48	2.65
18	Bamgko Pusako	732.52	8.25
	Jumlah	8 881.59	100.00

Sumber: Dinas Badan Pertahanan Nasional Kab.Rokan Hilir 2017

Secara administratif Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Mandau (Kab.Bengkalis) dan Kec. Kuto Darussalam, Kepenuhan, Tambusai (Kabupaten Rokan Hulu)
- c Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu (Provinsi Sumatera Utara)
- d Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Bukit Kapur Kota Dumai.

4.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 hektar, yang terletak pada koordinat 1° 14' sampai 2° 45' Lintang Utara dan 100° 17' hingga 101° 21' Bujur Timur.

Topografi Kabupaten Rokan Hilir sebagian dasar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 100 meter di atas permukaan laut. Pada daerah pesisir pantai memiliki ketinggian antara 0 s/d 6 meter dpl dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk daerah sepanjang aliran sungai, pada umumnya memiliki ketinggian antara 0 s/d 30 meter dpl. Daerah aliran sungai Rokan mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang surut air laut. Kemiringan lahan. Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0 s/d 15%. Daerah dengan kemiringan lereng 0 s/d 3% meliputi luasan sekitar 600.625 Ha atau 80% dari keseluruhan luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari

Kecamatan Bagan Sinembah, memiliki bentuk wilayah yang bervariasi antara datar s/d agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0 s/d 5% sampai 8 - 15%, dengan kemiringan ketinggian antara 5 s/d 100 meter dpl.

4.1.3 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh masih tingginya curah hujan bahkan di saat musim kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.100–2.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah kabupaten ini bervariasi antara 21°–34°C dengan tingkat kelembapan relatif berkisar antara 80%–84%.

4.1.4 Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2017 adalah 679.663 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000–2010 sebesar 4,58 persen per tahun. Sedangkan rasio jenis kelaminnya adalah 105 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 105 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi yaitu 176 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rantau Kopar dan Batu Hampar menempati urutan terendah yaitu 30 dan 31 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi, yaitu 83.679 jiwa, kemudian Kecamatan Bagan Sinembah 77.125 jiwa, Kecamatan Tanah Putih 70.933 jiwa, Kecamatan Bangko Pusako 64.713 jiwa, dan Kecamatan Rantau Kopar memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 6.902 jiwa.

Bila diamati perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk maka terjadi ketimpangan dalam penyebaran penduduk. Kecamatan Bangko yang luasnya hanya 5,35 persen dari luas Kabupaten Rokan Hilir menampung 12,31 persen penduduk, sedangkan Kecamatan Tanah Putih yang luasnya 21,56 persen menampung 10,44 persen penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan masalah kependudukan, kondisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan dan keadilan sosial lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 Berikut:

**Tabel 4.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tanah Putih	1915.23	70.933	37
2	Pujud	984.90	37.325	38
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	198.39	14.894	75
4	Rantau Kopar	231,13	6.902	30
5	Tanjung Medan	-	41.613	-
6	Bagan Sinembah	847.35	77.125	91
7	Simpang Kanan	445.55	31.749	71
8	Bagan Sinembah Raya	-	20.446	-
9	Balai Jaya	-	63.662	-
10	Kubu	385.36	22.853	59
11	Pasir Limau Kapas	669.63	41.003	61
12	Kubu Babusalam	675.70	24.091	36
13	Bangko	475.26	83.679	176
14	Sinaboi	335.48	13.637	41
15	Batu Hampar	284.31	8.765	31
16	Pekaitan	465.30	16.832	36
17	Rimba Melintang	235.48	39.441	167
18	Bangko Pusako	732.52	63.713	88

Sumber:Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

4.1.5 Penggunaan Lahan

Pada tahun 2017 luas lahan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 888.159ha. Lahan yang digunakan untuk hutan negara 7.893ha, perkebunan 350.143ha, tegal kebun, lading, huma 97.611ha, pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya 353.667ha, lahan yang sementara tidak diusahakan 25.458ha, sawah 21.098ha, padang rumput 1.376 ha dan sisanya seluas 30.913ha digunakan untuk lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.4 Berikut:

Tabel 4.4 Luas Lahan Menurut Penggunaan(ha) Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)
1	Perkarangan/Lahan untuk bangunan dan Halaman Sekitarnya	353.667
2	Tegal/Kebun/Ladang/Huma	97.611
3	Padang Rumput	1.376
4	Tambak	-
5	Kolam/Empang	-
6	Lahan Yang Sementara Tidak Diusahakan	25.458
7	Lahan Untuk Tanaman Kayu Kayuan	-
8	Perkebunan	350.143
9	Sawah	21.098
10	Rawa Yang Tidak Diusahakan	-
11	Hutan Negara	7.893
12	Lain Lain	30.913
	Jumlah	888.159

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.rohil 2017

4.2 Gambaran Kecamatan Batu Hampar

4.2.1 Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Kecamatan Batu Hampar merupakan sebuah Kecamatan baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Bangko. Dibentuk pada tanggal 29 Juni 2004 berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2004. Kecamatan Batu Hampar terletak berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir dan berhadapan dengan Kota Madya Dumai. Luas wilayah Kecamatan Batu Hampar adalah 178 Km² terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Bantaian, Desa Bantaian Baru, Desa Bantaian Hilir, Desa Sungai sialang Hulu, Desa Sungai sialang, dimana Desa Bantaian merupakan desa terluas yaitu 60 Km² dan desa yang terkecil adalah Desa Bantian Baru dengan luas wilayah 18 Km². Dimana Kecamatan Batu Hampar memiliki penduduk sebanyak 9.564 jiwa dan masyarakat yang menerima bantuan miskin di Kecamatan Batu Hampar sebanyak 307 jiwa 32% dari jumlah penduduk (Dinas Sosial Rohil 2017

Kondisi wilayah Kecamatan Batu Hampar yang dilintasi sungai roka dan jalan Lintas Bagansiapiapi-Pekanbaru dan Sumatera Utara, merupakan aset transportasi bagi masyarakat Batu Hampar baik jalan darat maupun perairan yang dilayari oleh pompong, sampan dan perahu. Sungai Rokan merupakan Akses terbesar sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat yang melintas sejauh 168 km² dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu.

Batas-batas daerah Kecamatan Tambang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangko
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sungai Rokan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Madya Dumai

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1. Bantayan	25.00	21.69
2. Bantayan Baru	19.25	16.70
3. Bantayan Hilir	25.00	21.69
4. Sungai Sialang Hulu	21.00	18.22
5. Sungai Sialang	25.00	21.69
Jumlah	115.25	100.00

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

b. Jarak Lurus Antara Kantor Desa Ke Kantor Camat dan Kantor Bupati

Interaksi antara desa dengan kota merupakan interaksi yang disebut juga dengan interaksi wilayah. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Yang saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala atau permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pentingnya mengetahui jarak lurus antara pusat pemerintahan desa dengan ibukota kecamatan khususnya Kecamatan Batu Hampar. Desa-desa di Kecamatan Batu Hampar merupakan wilayah yang penghasilannya mayoritas

di sektor pertanian. Maka dari itu, ini berguna juga bagi masyarakat baik sebagai tempat mata pencaharian sebagai sarana transportasi yang mana setelah masyarakat panen hasil dari panen tersebut bisa diperjual belikan di pusat kota. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 4.6 Berikut:

**Tabel 4.6 Jarak Dari Kantor Desa ke Kantor Camat dan Kantor Bupati
Kecamatan Batu Hampar Tahun 2107**

Desa/ Kelurahan	Jarak Lurus Dari Kantor Desa/Kelurahan	
	Ke Kantor Camat	Ke Kantor Bupati
1. Bantayan	2.5	28
2. Bantayan Baru	5	35
3. Bantayan Hilir	1	28
4. Sungai Sialang Hulu	6	20
5. Sungai Sialang	4	25

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Pada tabel 4.6 dapat diketahui lebih detail tentang jarak lurus antara pusat pemerintahan desa/kelurahan dengan Kantor Bupati Kecamatan Batu Hampar. Terlihat bahwa jarak desa/kelurahan yang paling dekat dengan Kantor Bupati Kecamatan Batu Hampar adalah Desa Sungai yang Sialang Hulu berjarak hanya 20 km saja. . Kemudian desa/kelurahan yang terjauh dari Kantor Bupati kecamatan adalah Desa Bantayan Baru dengan jarak 35 km.

Desa dan pusat pemerintahan (kota) memiliki interaksi yang disebut dengan Spatial Interaction atau interaksi wilayah. Ada 3 faktor yang memengaruhinya, yaitu Adanya wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk saling mengintervensi dan adanya kemudahan transfer. Tetapi tidak hanya 3 faktor yang telah disebutkan tadi yang menentukan interaksi antara desa dan kota. Ada yang dinamakan dengan zona interaksi desa dan kota. Semakin dekat jarak desa tersebut ke pusat pemerintahan atau pusat kota, maka semakin kuat dan baik interaksinya. Dan hal sebaliknya juga berlaku. Interaksi desa dan kota sangatlah penting. Tanpa adanya interaksi ini maka kota atau desa tersebut tidak akan berkembang dan kehidupan akan jalan ditempat.

4.2.2 Kondisi Alam

Kecamatan Batu Hampar beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan 161,51 mm/tahun, dan temperatur udara berkisar antara 22⁰C-35⁰C. Musim kemarau didaerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017 rata-rata 150 hari.

4.2.3 Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Penduduk terus menerus akan terus berkembang. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi yang terjadi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu atau dalam sebuah populasi menggunakan satuan “per waktu unit” untuk pengukuran

Mengetahui jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan pemerintahan khususnya Kecamatan Batu Hampar. Pemerintahan Kecamatan Batu Hampar terus memperbaharui data jumlah penduduk agar bisa dikorelasikan dengan berbagai aspek kehidupan lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Batu Hampar bisa dilihat pada Tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bantayan	1.305	1.250	2.555
2	Bantayan Baru	1.134	1.041	2.175
3	Bantayan Hilir	990	1.087	2.077
4	Sungai Sialang Hulu	663	557	1.220
5	Sungai Sialang	839	795	1.634
	Jumlah	4.931	4.730	9.661

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Berdasarkan tabel 4.7 jumlah penduduk Kecamatan Batu Hampar pada tahun 2017 sebesar 9.661 jiwa, dengan rata-rata per-rumah tangga (4,1 Jiwa /Rumah Tangga), Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Bantayan (2.555 jiwa) sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Sei Sialang Hulu (1.220 jiwa). Kepadatan penduduk di Kecamatan Batu Hampar sebesar 84 jiwa/km. Kepadatan penduduk tertinggi di Desa Bantayan Baru yaitu sebesar 113 jiwa/km dan terendah di Desa Sungai Sialang Hulu yaitu 58 jiwa/km. Di Kecamatan Batu Hampar penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak dari pada penduduk perempuan (sex ratio 101,1). Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan terdapat di seluruh Desa.

b. Jumlah Perumah Tangga

Informasi tentang jumlah rumah tangga, komposisi rumah tangga dan karakteristik demografi, sosial dan ekonomi sangat diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di Kecamatan Batu Hampar, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pangan dan penanganan kemiskinan.

Untuk memenuhi kebutuhan data rumah tangga Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar telah melakukan pendataan dan mendapatkan hasil sebagaimana yang tercantum di tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Rata-rata Jiwa Per Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (Jiwa)	Rata-rata
1	Bantayan	2.555	697	4
2	Bantayan Baru	2.175	591	4
3	Bantayan Hilir	2.077	412	5
4	Sungai Sialang Hulu	1.220	318	4
5	Sungai Sialang	1.634	355	5
	Jumlah	9.661	2.373	4

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Dari Tabel 4.8 bisa disimpulkan bahwa Kecamatan Batu Hampar mempunyai 2.373 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam

rumah tangga adalah 4 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan. Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga semakin banyak pula kebutuhannya. Begitupun sebaliknya. Jumlah penduduk perumahan tangga terbanyak adalah di Desa Bantayan dengan jumlah rumah tangga 697 dari jumlah penduduk 2.555 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perumahan tangga terkecil adalah di Desa Sungai Sialang Hulu dengan jumlah rumah tangga 318 dari jumlah penduduk 1.220 jiwa.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk juga dimaksud dengan jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah per kilometer. Kepadatan penduduk ditentukan dengan rumus berikut ini:

$$\text{Kepadatan penduduk (KP)} = \frac{\text{Jumlah penduduk di suatu wilayah}}{\text{Luas wilayah (Km2 atau Ha)}}$$

Informasi kepadatan penduduk tiap daerah harus diketahui untuk menganalisis dan mengetahui gejala kelebihan penduduk (overpopulation), untuk mengetahui pusat pusat aglomerasi penduduk, serta mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Untuk itu pemerintahan Kecamatan Batu Hampar sudah mendata dan membuat rincian kepadatan penduduk di Kecamatan Batu Hampar untuk keperluan diatas yang telah disebutkan sebelumnya. Data kepadatan penduduk di Kecamatan Batu Hampar dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut

Tabel 4.9 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
1	Bantayan	2.555	25.00	102
2	Bantayan Baru	2.175	19.25	113
3	Bantayan Hilir	2.077	25.00	83
4	Sungai Sialang Hulu	1.220	21.00	58
5	Sungai Sialang	1.634	25.00	65
	Jumlah	115.25	9.661	84

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Dapat kita simpulkan dari tabel 4.9 bahwa desa/kelurahan di Kecamatan Batu Hampar yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Desa Bantayan Baru dengan kepadatan penduduk 113 jiwa per kilometer nya. Sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil adalah di Desa Sungai Sialang Hulu dengan kepadatan penduduk hanya 58 jiwa per kilometernya.

Kepadatan penduduk pada daerah tertentu akan memiliki efek samping terkait dengan permasalahan kependudukan, antara lain: Munculnya kawasan-kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, tingginya kompetisi di dunia kerja, turunnya kualitas lingkungan dan terganggunya stabilitas keamanan.

4.2.4 Pendidikan

Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dari orang yang bersangkutan

Menurut Todaro (2000) alasan pokok mengenai pengaruh dari pendidikan terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif antara pendidikan seseorang dengan penghasilan yang akan diperolehnya. Adalah benar bahwa seseorang yang dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya atau perguruan tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang hanya mampu menyelesaikan sekolah yang lebih rendah tingkatannya, penghasilan mereka akan berbeda antara 300 hingga 800 persen. Oleh karena itu, tingkat pendapatan akan tergantung pada tahun-tahun sekolah yang dapat diselesaikannya, maka hal itu mendorong pemerintahan Kecamatan Batu Hampar untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan bisa membuat suatu perbedaan pendapatan yang sangat tidak adil dan menimbulkan jurang kemiskinan.

Di Kecamatan Batu Hampar terdapat berbagai jenjang pendidikan yang dimulai dari TK, SD, SMP/, SMU/SMK dan sebagainya. Dengan adanya sarana

pendidikan seperti ini diharapkan angka buta huruf dan anak tidak sekolah bisa diminimalisir sebaik mungkin. Tabel 4.10 berikut: akan memuat info sarana pendidikan di kecamatan Batu Hampar lebih detail lagi.

Tabel 4.10 Jumlah Pendidikan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah Siswa (Jiwa)	Jumlah Guru (Jiwa)
1	TK	-	10	-	22
2	SD	4	-	1160	60
3	SMP	2	1	434	26
4	SMU	1	-	475	34
5	SMK	-	-	-	-

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Hal yang bisa kita perhatikan dari tabel 4.10 adalah rasio pendidikan SMU yang Cuma hanya ada 1 bahkan pendidikan SMK nya tidak ada yang mana jumlah siswa pendidikan SMU terbilang lebih besar dengan jumlah 475 siswa. jika dibandingkan dengan jumlah pendidikan SMP yang ada 3 dengan jumlah siswa yang hanya berjumlah 434 siswa. Jika rasio pendidikan SMU lebih kecil maka tingkat kesulitan dalam mengikuti belajar mengajar pun akan sangat tinggi karna pendidikan dan prasarana yang terbatas dan murid pun mungkin tidak serius dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi jika rasio pendidikan SMU lebih tinggi atau sama rata maka kesulitan dalam belajar mengajar pun akan lebih rendah dan murid akan mengikuti pembelajaran dengan serius.

Selain itu, sedikitnya lembaga pendidikan negeri akan memberi kesulitan lain terhadap masyarakat Kecamatan Batu Hampar. Tinggi nya biaya pendidikan

di lembaga pendidikan swasta menjadi pertimbangan tersendiri oleh banyaknya wali murid. Pendidikan negeri di Kecamatan Batu Hampar sebenarnya sangat membantu masyarakat miskin dengan adanya program wajib belajar 12 tahun yang dengan ini otomatis pendidikan di sekolah negeri sangat murah dibandingkan dengan sekolah swasta yang ada

4.2.5 Kesehatan

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan hal ini akan memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti di puskesmas, rumah sakit, posyandu dan lain sebagainya.

Berikut ini Tabel 4.11 jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Batu Hampar

Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Rumah Sakit/Rumah Bersalin	Balai Pengobatan/Poliklinik	Puskesmas	Pustu	Praktek Dokter	Praktek Bidan	Poskesdes	Polindes	Posyandu	Apotek	Toko Khusus Jamu
1	Bantayan	-	-	3	-	1	-	2	-	1	1	-	2
2	Bantayan Baru	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
3	Bantayan Hilir	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-
4	Sungai Sialang Hulu	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
5	Sungai Sialang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
6	Jumlah	-	1	3	1	3	-	6	-	3	5	-	2

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tubuh manusia yang sehat akan mendukung kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana kesehatan diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Masyarakat juga bisa mengandalkan poliklinik untuk pengobatan lainnya.

Sarana yang ada di Kecamatan Batu Hampar hanya terdapat satu puskesmas. Adanya 2 atau 3 puskesmas sudah agak membantu memenuhi permintaan pelayanan kesehatan. Posyandu juga sudah tersedia di setiap desa kelurahan di Kecamatan Batu Hampar untuk memantau dan mengawasi kesehatan anak-anak.

b. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan guna memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berikut ini adalah Tabel 4.12 jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Batu Hampar:

Tabel 4.12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun Bidan
1	Bantayan	-	6	1	2
2	Bantayan Baru	-	2	-	2
3	Bantayan Hilir	1	1	7	1
4	Sungai Sialang Hulu	-	1	1	1
5	Sumgai Sialang	-	4	6	4
	Jumlah	1	14	15	10

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Dari tabel 4.12 bisa dilihat bahwa Kecamatan Batu Hampar kekurangan tenaga kesehatan terutama untuk tenaga dokter yang hanya ada 1 yaitu di Desa Banatayan Hilir Di sebagian besar desa-desa di Kecamatan tidak memiliki dokter umum dan spesialis sama sekali. Masyarakat di Kecamatan Batu Hampar hanya mengandalkan bidan desa dan dukun kampung/dukun bayi untuk berobat. Tentu dengan kondisi seperti ini proses pengobatan tidak akan bisa maksimal karena kadang alat-alat kesehatan dan obat-obatan pun terbatas

4.2.6 Ekonomi

a. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama masyarakat Kecamatan Batu Hampar yang mampu mendongkrak perekonomian daerah seperti yang dikatakan oleh Pendapat Asli Daerah (PAD) sebab lebih dari 70% masyarakat bekerja pada sektor pertanian, terutama pertanian perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, pinang, dan lainnya. Berikut Tabel 4.13 mengenai luas dan jumlah produksi tanaman perkebunan yang ada di Kecamatan Batu Hampar

Tabel 4.13 Banyaknya Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

No	Jenis Komoditi	Jumlah (Ha)	Pruduksi (Ton)
1	Karet	19.00	3.06
2	Kelapa	470.00	519.12
3	Kelapa Sawit	2.364	4.888.19
4	Kakao	-	-
5	Kopi	-	-
6	Pinang	3.00	0.41
	Jumlah	2.856.00	5.410.76

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir 2017

b. Pertenakan

Peternakan di Kecamatan Batu Hampar kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Jenis hewan yang ditenakkan di Kecamatan Batu Hampar diantaranya. sapi, ayam buras/ayam kampung, kambing/domba, kerbau, itik dan babi. Hasil peternakan tersebut di antaranya. daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). Selain itu, kotoran hewan juga dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Batu Hampar untuk menyuburkan tanah. dan tenaga hewan juga dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah yang ada di Kecamatan Batu Hampar.

c. Industri dan Perdagangan

Keberadaan sektor industri di Kecamatan Batu Hampar Saat ini terdapat 2 unit industri kecil yaitu industri mikro dan rumah tangga. Jenis industri diantaranya. kulit, kayu, logam, anyaman, gerabah/batu, kain/tenun, makanan dan lainnya. Dimana semua jenis industri tersebut diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Batu Hampar. Usaha kecil dan mikro ini diharapkan akan lebih meningkat dan berkembang untuk tahun yang akan datang. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Tabel 4.14 berikut :

**Tabel 4.14 Jumlah Industri Kecil Mikro dan Rumah Tangga Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017**

No	Desa/Kelurahan	Kulit	Kayu	Logam	Anyaman	Gerabah/Batu
1	Bantayan	-	-	-	-	-
2	Bantayan Baru	-	1	-	-	-
3	Bantayan Hilir	-	-	-	-	-
4	Sungai Sialang Hulu	-	-	-	-	-
5	Sungai Sialang	-	-	-	-	-
	Jmlah	-	1	-	-	-

No	Desa/Kelurahan	Kain/Tenun	Makanan	Jumlah
1	Bantayan	-	-	-
2	Bantayan Baru	-	-	1
3	Bantayan Hilir	-	-	-
4	Sungai Sialang Hulu	-	-	-
5	Sungai Sialang	-	-	-
	Jmlah	-	-	1

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

Sarana perekonomian di Kecamatan Batu Hampar terdiri dari 2 supermarket dan minimarket. 61 toko dan warung kelontong beberapa jumlah sarana ekonomi dan UMKM yang ada diharapkan dapat menggairahkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat serta sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15 Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian Menurut

Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Supermarket	Minimarket	Toko, warung kelontong	Restoran	Warung/Kedai nasi
1	Bantayan	1	1	6	-	4
2	Bantayan Baru	-	-	14	-	1
3	Bantayan Hilir	-	-	16	-	1
4	Sungai Sialang Hulu	-	-	16	-	2
5	Sungai Sialang	-	--	9	-	21
6		1	1	61	-	29

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Batu Hampar 2017

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Batu Hampar

Analisis karakteristik kemiskinan merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui karakteristik kemiskinan yang terdapat di lokasi penelitian, Analisis karakteristik kemiskinan di dapatkan melalui analisis terhadap kesehatan (penolong persalinan, vaksinasi, dan jaminan kesehatan), pendidikan (partisipasi sekolah dan buta huruf) dan standar kehidupan (sanitasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan kondisi rumah),

5.1.1 Kesehatan Kecamatan Batu Hampar

Kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat berharga dan penting untuk dijaga baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Kesehatan memiliki dampak yang sangat besar dalam hal peningkatan kualitas hidup. Kesehatan mempengaruhi tingkat fungsional seseorang baik dalam dari segi fisiologis, psikologis dan dimensi sosikultural. Kesehatan sama dengan hal-nya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penganggulangan kemiskinan.

Setiap individu berhak untuk mendapatkan kesehatan yang memadai tanpa adanya perbedaan ras, paham politik, agama, kondisi sosial maupun ekonomi, Sifat-Nya multidimensi, dimungkinkan akan terdapat permasalahan akses yang rendah terhadap layanan kesehatan dalam kemiskinan. Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan yang sederhana, dan merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

Kesehatan yang buruk menyakibatkan kemiskinan dan kemiskinan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah. Menurut *word bank* (2002) bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan.

Kesehatan merupakan salah satu indikator menentukan karakteristik kemiskinan di suatu daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Terdapat tiga penilaian kesehatan di dalam penilaian akan karakteristik kemiskinan antara lain; (1) penolong vaksinasi, (2) vaksinasi, dan (3) jaminan kesehatan. Berdasarkan indikator-indikator dalam aspek kesehatan penentu akan karakteristik kemiskinan, maka di lakukannya analisis terhadap indikator-indikator tersebut di Kecamatan Batu Hampar untuk mengetahui akan karakteristik yang terjadi di Kecamatan Batu Hampar.

Indikator kesehatan terdapat penolong persalinan sebagai salah satu alat ukurnya, dengan mengetahui persentase ibu hamil yang di tolong persalinannya di Kecamatan Batu Hampar, maka dapat digambarkan bagaimana kondisi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar, karena ada faktor dari kendala biaya yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan penolong persalinan.

Vaksinasi disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Vaksinasi berasal dari bahasa latin yakni *vacca* yang bearti sapi, hal ini dikarenakan vaksin pertama kali berasal dari virus yang menginfeksi sapi (cacar sapi). Vaksinasi merupakan salah satu indikator kesehatan sebagai salah satu alat ukur dalam penentuan karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar.

Jumlah partisipasi masyarakat kota sangat jauh berbeda terhadap masyarakat desa tentang kepedulian pentingnya vaksinasi tersebut. Pengetahuan, sikap tidak peduli hingga kendala ekonomi menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap pentingnya vaksinasi,

Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama yakni pada tahun 1968.

Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968, Pada saat itu pemerintah juga mendirikan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional.

Beberapa program bantuan salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digratiskan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut, dengan digratiskannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah maka sangat membantu sehingga kendala biaya pengobatan sudah cukup bisa diatasi. KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera,.

Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan, Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

KIS sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang

sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin.

Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan, Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya, Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah, Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:

- a. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut.
- b. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu, Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.
- c. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia, Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja.

- d. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
- e. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan.

Mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar. Mengetahui akan karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skla likert*, Adapun untuk mengetahui hasil dari karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.1 Rekapitulasi Nilai Responden Skala likert Hasil Variabel

Kesehatan

No	Kesehatan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
1	Sarana Kesehatan	SS (5)	10	50	3,85	1,431
		S (4)	15	60		
		N (3)	5	15		
		TS (2)	20	40		
		STS (1)	50	50		
		Total	100	215		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{215}{500} \times 100$ $= 43 \%$ $= \text{Cukup}$				
2	Perlengkapan dalam Penolong Vaksinisasi	SS (5)	60	300	4,25	1,140
		S (4)	20	80		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	425		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{425}{500} \times 100$ $= 85 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
3	Tenaga Kesehatan dalam Penolong Vaksinisasi	SS (5)	40	200	3,90	1,185
		S (4)	30	120		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	390		

No	Kesehatan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{390}{500} \times 100$ $= 79 \%$ $= \text{Setuju}$				
4	Akseibilitas	SS (5)	30	150	3,80	1,128
		S (4)	40	160		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	380		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{380}{500} \times 100$ $= 76 \%$ $= \text{Setuju}$				
5	Jaringan Listrik	SS (5)	30	150	3,53	1,251
		S (4)	22	88		
		N (3)	30	90		
		TS (2)	18	36		
		STS (1)	10	10		
		Total	100	374		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{374}{500} \times 100$ $= 74,80 \%$ $= \text{Setuju}$				
6	Program KB	SS (5)	55	275	4,15	1,158
		S (4)	20	80		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		

No	Kesehatan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		Total	100	415		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{415}{500} \times 100$ $= 83 \%$ $=$ Sangat Setuju				
7	Program Vaksinasi	SS (5)	60	300	4,30	1,106
		S (4)	25	100		
		N (3)	5	15		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	430		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{430}{500} \times 100$ $= 86 \%$ $=$ Sangat Setuju				
8	Jaminan Kesehatan	SS (5)	70	280	4,33	1,207
		S (4)	10	40		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	3	6		
		STS (1)	7	7		
		Total	100	363		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{363}{500} \times 100$ $= 72 \%$ $=$ Setuju				
9	Program BPJS	SS (5)	80	400	4,62	,908
		S (4)	10	40		
		N (3)	5	15		
		TS (2)	2	4		

No	Kesehatan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		STS (1)	3	3		
		Total	100	462		
		Indeks (%) = $\frac{\text{Total Skor}}{y} \times 100$ $= \frac{462}{500} \times 100$ $= 92,4 \%$ = Sangat Setuju				

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan dari table 5.1 dapat diketahui bahwa karakteristik kemiskinan pada aspek kesehatan di Kecamatan Batu Hampar terdapat beberapa indikator dalam penentuan akan karakteristik kemiskinan. Indikator-Indikator tersebut antara lain sarana kesehatan, perlengkapan alat dalam penolong persalinana, tenaga kesehatan dalam penolong persalinan, aksesibilitas, jaringan listrik, program KB, program vaksinasi, terdapatnya jaminan kesehatan dan program BPJS.

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan hasil bahwa sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Batu Hampar memiliki skor paling rendah di bandingkan dengan indikator-indikator lainnya yakni dengan skor 43%. Hal ini menunjukkan bahwa sarana kesehatan di Kecamatan Batu Hampar sudah sangat bagus akan tetapi perlengkapan penolong kesehatan, tenaga kesehatan, aksesibilitas, jaringan listrik, program KB, program vaksinasi, jaminan kesehatan dan program BPJS di Kecamatan Batu Hampar dalam karakteristik kemiskinan tidak memadai atau merupakan penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar.

5.1.2 Pendidikan Kecamatan Batu Hampar

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pembangunan, Pendidikan memiliki keterkaitan antara kemiskinan yang sangat besar. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu komponen penyebab terjadinya kemiskinan. Pembangunan bidang pendidikan adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Mengatasi akan masalah kemiskinan pada zaman sekarang sangat penting bagi setiap masyarakat beserta pemerintah untuk saling berkerjasama dalam memfokuskan perhatian dalam memberantas kemiskinan yang terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Permasalahan akan kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama mengatakan bahwa kurangnya akan peran serta

pemerintah secara nyata dalam hal mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama dalam hal akses sumberdaya terutama dalam bidang pendidikan, maka akan berdampak kepada pertumbuhan dan kemajuan wilayah yang menjadi relative sangat lambat.

Sudut pandang ke-dua menyatakan bahwa sebagian masyarakat berpandangan sempit bahwa pendidikan bukanlah segalanya. Berdasarkan sudut pandang tersebut terjadinya kritis motivasi dan keinginan akan kebutuhan pendidikan sangat rendah, maka oleh sebab itu di butuhkannya suatu usaha dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan.

Permasalahan akan kemiskinan memberikan suatu keadaran kepada masyarakat dan pemerintah dalam melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesadaran mereka akan kebutuhan pendidikan.

Pemberantasan akan masalah kemiskinan di lakukannya berbagai upaya. Upaya-upaya dalam penanggulangan akan masalah kemiskinan pada masyarakat dapat diselesaikan melalui bidang pendidikan. Memberikan pelatihan kepada masyarakat, memberikan berbagai program beasiswa kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, dan upaya-upaya lainnya.

Peranan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan dalam memberantas kebodohan dan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya, terlebih masyarakat di pedesaan yang tingkat kesejahteraan

hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat disekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia.

Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan saling membantu dalam melakukan pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dengan sasaraannya yang jelas.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya angka partisipasi sekolah tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar di lakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar. Mengetahui akan karakteristik kemiskinan pada bidang pendidikan di Kecamatan Batu Hampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skala likert*.Adapaun untuk mengetahui hasil dari karakteristik kemiskinan pada bidang pendidikan di Kecamatan Batu Hampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.2 Rekapitulasi Nilai Responden Skala likert Hasil Variabel Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
1	Program Pendidikan	SS (5)	40	160	3,90	1,193
		S (4)	30	120		
		N (3)	16	48		
		TS (2)	8	16		
		STS (1)	6	6		
		Total	100	350		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ $= \frac{350}{500} \times 100$ $= 70 \%$ $= Setuju$				
2	Bantuan Pendidikan	SS (5)	63	315	4,28	1,147
		S (4)	17	68		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		

No	Pendidikan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		Total	100	428		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ $= \frac{428}{500} \times 100$ $= 85,6 \%$ $= Sangat Setuju$				
3	Sarana Pendidikan	SS (5)	5	25	2,05	1,123
		S (4)	5	20		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	30	60		
		STS (1)	40	40		
		Total	100	205		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ $= \frac{205}{500} \times 100$ $= 41 \%$ $= Cukup$				
4	Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan	SS (5)	5	25	2,00	1,231
		S (4)	10	40		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	20	40		
		STS (1)	50	50		
		Total	100	200		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ $= \frac{200}{500} \times 100$ $= 40 \%$ $= Cukup$				
5	Partisipasi Masyarakat	SS (5)	45	225	3,95	1,209
		S (4)	25	100		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	10	20		

No	Pendidikan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		STS (1)	5	5		
		Total	100	395		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$				
		= $\frac{395}{500} \times 100$				
			= 79 %			
			= Setuju			
6	Program Pendidikan Mengatasi Masalah Buta Huruf	SS (5)	60	300	4,25	1,140
		S (4)	20	80		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	425		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$				
= $\frac{425}{85} \times 100$						
			= 43 %			
			= Cukup			

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan table 5.2 diketahui bahwa pada umumnya masyarakat menyatakan cukup. Hanya pada indikator pasrtisipasi masyarakat dan program masyarakat menyatakan setuju dan bantuan pendidikan yang menyatakan sanagat

setuju bahwa program tersebut dapat membantu mengatasi akan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu karakteristik yang menentukan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

5.1.3 Standar Kehidupan Kecamatan Batu Hampar

Salah satu indikator dalam menilai karakteristik kemiskinan yang telah di keluarkah oleh Bappenas yakni standar kehidupan. Standar kehidupan memiliki hubungan yang sangat signifikan akan kemiskinan. Apabila suatu kota atau wilayah memiliki standar kehidupan yang layak, maka suatu wilayah atau daerah tersebut dapat dikategorikan layak, akan tetapi apabila suatu wilayah atau daerah tersebut memiliki tingkat standar hidup yang tidak layak, maka suatu wilayah atau daerah berada pada garis kemiskinan.

Menghitung standar kehidupan pada suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai pada suatu wilayah dan daerah tersebut, yakni seperti kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik dan kondisi rumah. Indikator-indikator di dalam standar kehidupan tersebut di gunakan dalam mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar.

Air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu *grey water* (air bekas mandi dan cuci) serta *black water* (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Batu Hampar terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan *septic tank* maupun *cubluk*. Sedangkan sistem

komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok (KSM), baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal.

Secara umum kondisi pengelolaan Air limbah domestik di Kecamatan Batu Hampar masih belum memadai. Sistem pengelolaan air limbah domestik belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Kecamatan Batu Hampar pada saat ini pengelolaan *black water* (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih belum ada.

Sementara itu Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara *on-site system (setempat)*. Sistem pengolahan air limbah secara *onsite sistem* pun masih belum memadai. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas *black water* yang berasal dari tinja, *urine*, air pembersih dan air pengelontor.

Masyarakat umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan konstruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik, pipa sewer dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai.

Pelayanan akan air bersih di Kecamatan Batu Hampar pada saat sekarang sudah terhubungnya dengan program dari pemerintah yakni proyek SPAM.

Program tersebut diharapkan dapat memenuhi masyarakat di Kecamatan Batu Hampar. Program tersebut baru terdapat pada tahun 2021.

Penduduk di Kecamatan Batu Hampar mendapatkan air bersih yang salah satunya digunakan untuk sumber air minum secara individual yaitu dengan memanfaatkan sumber - sumber air yang ada di sekitarnya yaitu berupa, air tanah dangkal (sumur bor), air permukaan (sungai) dan air tadah hujan, air permukaan dan sumur dangkal dimana kualitasnya tidak layak sebagai sumber air baku untuk air minum, rata-rata di setiap desa air sumur dangkal/sumur gali dan sumur air tanah dalam merupakan sumber air baku utama untuk penyediaan air minumnya disamping sebagai *alternative* masyarakat memanfaatkan pelayanan air bersih komersil swasta dengan membeli air kemasan isi ulang.

Jaringan listrik merupakan salah satu prasarana yang sangat di butuhkan pada masa saat sekarang. Dimana banyaknya wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terdapatnya jaringan listrik atau penggunaan jaringan listrik yang hanya dibatasi waktunya. Kondisi jaringan listrik merupakan salah satu indikator dalam penentuan akan standar kehidupan suatu wilayah atau daerah.

Pemenuhan akan kebutuhan jaringan listrik yang sangat tinggi setiap tahunnya akan memberikan dampak dalam hal kondisi jaringan listrik pada suatu wilayah atau daerah. Kondisi berakibatkan banyak masyarakat tidak menggunakan jaringan listrik. Alasan utama masyarakat tidak menggunakan jaringan listrik yakni tidak adanya biaya dalam hal pembayaran listrik tersebut. Kondisi ini mengakibatkan angka kemiskinan yang semakin bertambah akan tetapi tidak di imbangi dengan kondisi jaringan listrik yang memadai.

Mengatasi akan masalah tersebut maka telah dilakukannya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengatasi akan masalah tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya pemerataan jaringan listrik di seluruh Indonesia. Selain akan program tersebut pemerintah juga menerapkan akan program percepatan elektrifikasi di pedesaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik.

Secara umum di Kecamatan Batu Hampar dalam hal prasarana jaringan listrik sudah tersedia di berbagai kawasan permukiman di Kecamatan Batu Hampar. Kondisi jaringan listrik tersebut dalam keadaan baik, banyaknya masyarakat dalam kehidupan sehari menggunakan jaringan listrik dalam kehidupan sehari-harinya.

Rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup manusia, dia masuk dalam sebuah lingkaran kebutuhan pokok yang setiap insan harus memilikinya. Sebagai salah satu kebutuhan primer bagi hidup manusia, rumah amat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang.

Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh. Seiring berjalannya waktu, rumah berkembang menjadi sebuah identitas bagi pemiliknya. Rumah yang awalnya untuk tempat berlindung dari panas, hujan dan binatang luar, berubah menjadi status sosial sang pemilik. Rumah dimasa kini menjadi gambaran jati diri, karakter dan nilai hidup seseorang.

Kondisi rumah merupakan salah satu indikator yang di keluarkan oleh BAPPENAS untuk menilai karakteristik kemiskinan di suatu daerah. Kondisi rumah di suatu daerah akan menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Semakin banyak masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah disuatu daerah maka akan ada unit-unit rumah dengan kondisi tidak layak huni di daerah tersebut, maka akan ada suatu program khusus baik yang dilakukan pemerintah maupun swadaya untuk membuat program bantuan rumah untuk rumah tidak layak huni.

Kondisi rumah di Kecamatan Batu Hampar terdiri atas kondisi rumah permanen, kondisi rumah semi permanen, dan kondisi rumah tidak permanen, Hal ini dapat dilihat kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Batu Hampar tersebut.

Mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar di lakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar. Mengetahui akan karakteristik kemiskinan pada bidang standar kehidupan di Kecamatan Batu Hampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skla likert*. Adapun untuk mengetahui hasil dari karakteristik kemiskinan pada bidang pendidikan di Kecamatan Batu Hampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.3 Rekapitulasi Nilai Responden Skala likert Hasil Standar

Kehidupan

No	Standar Kehidupan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
1	Program SPAM	SS (5)	40	200	3,90	1,185
		S (4)	30	120		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	390		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ = $\frac{390}{500} \times 100$ = 78 % = Cukup				
2	Program Sanitasi	SS (5)	30	150	3,40	1,435
		S (4)	20	80		
		N (3)	30	90		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	10	20		
		Total	100	360		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ = $\frac{360}{500} \times 100$ = 72 % = Cukup				
3	Program Jaringan Listrik	SS (5)	35	175	3,54	1,314
		S (4)	10	40		
		N (3)	35	105		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	10	10		
		Total	100	350		

No	Standar Kehidupan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{350}{500} \times 100$ $= 70 \%$ $= \text{Cukup}$				
4	Program Layak Huni	SS (5)	60	300	4,15	1,201
		S (4)	10	40		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	415		
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{415}{500} \times 100$ $= 83 \%$ $= \text{Cukup}$				

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

TS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa pada umumnya masyarakat menyatakan cukup.. Hal ini menunjukkan bahwa standar kehidupan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

5.2 Faktor Kemiskinan Kecamatan Batu Hampar

Faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan batu hampar pada umumnya hamper sama dengan kecamatan lainnya yang ada di Indonesia, yakni disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, taraf kebutuhan ekonomi, kesejahteraan, pendapatan, penangguran, tanggungan keluarga, keterbatasan modal usaha, status pekerjaan, dan penghasil yang rendah, Faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi akan tingkat kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar.

Status pekerjaan dari responden yang telah di data hampir semuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Tetapi keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat, Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Pada umunya masyarakat di Kecamatan Batu Hampar berkerja sebagai petani. Pendapatan perbulan rata – rata setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari menggambarkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Batu Hampar adalah masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah) dan memiliki jumlah tanggungan yang lebih banyak, Jika dalam suatu rumah tangga memiliki jumlah tanggungan tidak diimbangi dengan tingkat

pendapatan keluarga yang tinggi akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan social masyarakat Kecamatan Batu Hampar.

Mengingat umumnya pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Batu Hampar memperoleh pendapatan yang rendah dan tidak menentu serta status rumah tangga yakni termasuk kedalam MBR dan berpengaruh kepada pendapatan perbulan apabila ini terjadi terus menerus maka akan peningkatkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar, Hal ini dikarenakan dalam setiap keluarga hanya satu orang yang bekerja.

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan rumah tangga tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kondisi sosial dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Banyak sedikitnya anggota keluarga, erat kaitannya dengan pengeluaran.

Keadaan ini mendorong rumah tangga untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab semakin tinggi jumlah tanggungan dalam keluarga maka semakin tinggi pula pengeluaran yang dikeluarkan.

Tingkat pendidikan erat hubungannya dengan daya nalar dan sikap atau perilaku masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cenderung usaha yang dikelola atau pekerjaan yang diperoleh lebih rasional atau lebih baik dengan memanfaatkan pendidikan yang dimiliki baik diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal.

Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam menentukan sumber daya manusia dalam hal pola pikir. Pendidikan yang rendah tidak mampu untuk merubah pola pikir seseorang untuk berorientasi kedepan. Tingkat pendidikan di lokasi penelitian rata-rata masih sangat rendah yaitu mayoritas responden masih berpendidikan SD–SMP dan hanya sedikit yang tamat SMA ke atas, Sehingga tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang masih rendah menyulitkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Rendahnya tingkat pendidikan maka masyarakat tidak mempunyai akses yang baik terhadap informasi, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam berfikir untuk beralih pekerjaan lain selain petani, pedagang untuk mengembangkan usaha memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan yang rendah ini akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan akibat dari pekerjaan yang tidak dapat memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup masing-masing keluarga sehingga berpengaruh pada pendapatan rumah tangganya.

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal dan landbank juga menjadi salah satu sebab banyak pengembang khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) gulung tikar. Harga tanah yang semakin tak ekonomis bagi rumah MBR sehingga pengembang kesulitan karena harga rumah MBR sudah dipatok pemerintah menjadi kendala besar apalagi sosialisasi untuk masyarakat tentang koperasi dan lain sebagainya sangat minim.

Mengetahui faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar di lakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar, Mengetahui akan karakteristik kemiskinan pada bidang standar kehidupan di Kecamatan Batu Hampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skla likert*. Adapaun untuk mengetahui hasil dari faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4 Rekapitulasi Nilai Responden Skala likert Hasil Faktor Kemiskinan

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden			Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
1	Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kesejahteraan	SS (5)	65		325	4,30	1,150
		S (4)	15		60		
		N (3)	10		30		
		TS (2)	5		10		
		STS (1)	5		5		
		Total	100		430		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ = $\frac{430}{500} \times 100$ = 86 % = Sangat Setuju					
2	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Pentingnya Pendidikan	SS (5)	40		200	3,90	1,185
		S (4)	20		80		
		N (3)	20		60		
		TS (2)	10		20		
		STS (1)	10		10		
		Total	100		370		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$					

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		$= \frac{370}{500} \times 100$ $= 74 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
3	Taraf Kebutuhan Ekonomi	SS (5)	30	150	3,40	1,435
		S (4)	30	120		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	10	10		
		Total	100	360		
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{360}{500} \times 100$ $= 72 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
4	Pendidikan Wajib 12 Tahun	SS (5)	75	375	4,52	,969
		S (4)	10	40		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	2	2		
		Total	100	467		
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{467}{500} \times 100$ $= 93,4 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
5	Pentingnya Pendidikan	SS (5)	60	300	4,38	,930
		S (4)	25	100		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	3	6		
		STS (1)	2	2		
		Total	100	438		

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{y} \times 100$ $= \frac{438}{500} \times 100$ $= 87,6 \%$ $= \text{Setuju}$				
6	Upah mempengaruhi akan Kemiskinan	SS (5)	55	275	4,15	1,158
		S (4)	20	80		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	415		
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{y} \times 100$ $= \frac{415}{500} \times 100$ $= 83 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
7	Pentingnya Pendapatan untuk Kebutuhan Sehari-hari	SS (5)	70	350	4,35	1,158
		S (4)	10	40		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	435		
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{y} \times 100$ $= \frac{435}{500} \times 100$ $= 87 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
8	Tamatan SD Sulit Mendapatkan Pekerjaan	SS (5)	65	325	4,35	1,114
		S (4)	20	80		
		N (3)	5	15		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		Total	100	435		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{435}{500} \times 100$ $= 87 \%$ $=$ Sangat Setuju				
9	Tamatan D-III / S-1 / S-2 / S-3 Mudah dalam Mendapatkan Pekerjaan	SS (5)	20	100	3,10	1,267
		S (4)	10	40		
		N (3)	45	135		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	15	15		
		Total	100	310		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{310}{500} \times 100$ $= 62 \%$ $=$ Cukup				
10	Pengguran Beroengaruh Terhadap Kemiskinan	SS (5)	50	250	4,15	1,114
		S (4)	30	120		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	415		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{415}{500} \times 100$ $= 83 \%$ $=$ Sangat Setuju				
11	Banyaknya Tanggungan Mempengaruhi Tingkat	SS (5)	55	275	4,15	1,158
		S (4)	20	120		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	5	10		

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
	Kemiskinan	STS (1)	5	5		
		Total	100	455		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ = $\frac{455}{500} \times 100$ = 91 % = Sangat Setuju				
12	Pentingnya	SS (5)	70	350	4,70	0,461
	Bekerja	S (4)	30	120		
	Pengaruh	N (3)	0	0		
	Terhadap	TS (2)	0	0		
	Penghasilan	STS (1)	0	0		
	Total	100	470			
	Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ = $\frac{470}{500} \times 100$ = 94% = Cukup					
13	Penghasilan	SS (5)	60	300	4,50	0,674
	Rendah terhaap	S (4)	30	120		
	Tingkat	N (3)	10	30		
	Kebutuhan	TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
	Total	100	450			
	Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ = $\frac{450}{500} \times 100$ = 90 % = Cukup					
14	Kemalasan	SS (5)	55	275	4,35	0,796
	Mempengaruhi	S (4)	25	100		
	Tingkat	N (3)	20	60		

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
	Kebutuhan	TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
		Total	100	435		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ $= \frac{435}{500} \times 100$ $= 87 \%$ $=$ Cukup				
15	Besarnya Upah Meningkatkan Kesejahteraan	SS (5)	60	300	4,50	0,674
		S (4)	30	120		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
		Total	100	450		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ $= \frac{450}{500} \times 100$ $= 90 \%$ $=$ Sangat Setuju				
16	Keterbatasan Modal Usaha Mempengaruhi Kemiskinan	SS (5)	50	250	4,30	0,785
		S (4)	30	120		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
		Total	100	430		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{y} \times 100$ $= \frac{430}{500} \times 100$ $= 86 \%$ $=$ Sangat Setuju				
17	Berpenghasilan Tinggi Mampu	SS (5)	70	350	4,55	0,744
		S (4)	15	60		

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
	Memenuhi Kebutuhan Hidup	N (3)	15	45		
		TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
		Total	100	455		
		Indeks (%) = $\frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{455}{500} \times 100$ $= 91 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan table 5.4 diketahui bahwa pada umumnya masyarakat menyatakan sangat setuju terkait akan faktor yang mempengaruhi akan kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hulu yakni social ekonomi mempengaruhi kemiskinan.

5.3 Strategi Penanganan Kemiskinan

Data yang telah didapatkan dalam penelitian yang kemudian dilakukannya analisa dengan menggunakan analisa SWOT yang merupakan langkah awal atau upaya dalam menentukan isu strategis yang pada akhirnya berkaitan dalam perumusan atau penentuan strategi mengatasi permasalahan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar. Data – data yang telah dikumpulkan baik dari survei, observasi lapangan, kuesioner, interview, instansi – instansi terkait, yang akan kemudian dilakukannya analisa berdasarkan daya nalar dan pola pikir peneliti dalam hal menghubungkan fakta – fakta, informasi, dan data – data dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Tabel 5.2 Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal
Kekuatan (Strenght) S
1) Kecamatan Batu Hampar memiliki sarana kesehatan yang sangat memadai. 2) Kecamatan Batu Hampar memiliki lahan pertanian yang berpotensi untuk menghasilkan produk tanaman pangan dan pertanian. 3) Adanya tingkat jaminan kesehatan yang memadai 4) Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. 5) Tingkatan jumlah penduduk yang buta huruf relatif rendah. 6) Tingkatan sanitasi yang bagus. 7) Jaringan listrik yang sudah memadai dan merata. 8) Memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat bagus untuk lahan pertanian. 9) Air bersih yang memadai.
Kelemahan (Weakness – W)
1) Tingkat pendidikan rendah 2) Tingkat pengangguran tinggi 3) Tingkat pendapatan rendah 4) Jumlah tnggungan keluarga nya sangat banyak

5) Tingkat pendapatan tidak memenuhi tanggungan keluarga 6) Tidak memiliki modal usaha 7) Sarana pendidikan tidak memadai 8) Koordinasi antara kelompok tani masih kurang. 9) Masih banyaknya sarana perkenomian yang ada di Kecamatan Batu Hampar yang belum memiliki IMB dan tidak memiliki sertifikat tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 10) Tingkat penolongan dalam perssalinan sangatlah minim 11) Peralatan dalam penolong pesalinan yang tidak memadai 12) Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dalam hal penolongan persalinan. 13) Partisipasi masyarakat dalam hal vaksinisasi sangat rendah. 14) Jumlah penduduk yang berpendidikan di kecamatan batu hamapar sanagat rendah. 15) Jumlah penduduk tamat sekolah rata-rata hanya berpendidikan rendah. 16) Masih banyak kondisi rumah kayu dan semi permanen.
Faktor Eksternal
Peluang (Opportunities – O)
1) Memiliki letak yang sangat strategis 2) Akseibilitas yang mudah dan mobiitas yang tinggi 3) Adanya program ari pemerintah baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan standar kehidupan 4) Adanya bantuan kepada kelompok tan (PKH). 5) Memiliki jarak yang sangat dekat dengan ibu kota kabupaten. 6) Terdapatnya koperasi simpan pinjam
Ancaman (Threats – T)
Masuknya tenaga kerja dari luar wilayah yang dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan yang ada di Kecamatan Batu Hampar. Pendistribusian program yang tidak merata di Kecamatan Batu Hampar mengakibatkan hambatnya perekonomian di Kecamatan Batu Hampar.

Sumber : Hasil Analisa, 202

Tabel 5.3 Matrix SWOT

Internal/Eksternal	Opportunities (Kesempatan)	Threat (Ancaman)
Strenght (Kekuatan)	Meningkatkan manajemen pasar Memberdayakan masyarakat di Kecamatan Batu Hampar Kecamatan Batu Hampar memiliki lahan pertanian yang potensial untuk menghasilkan produk tanaman pangan	Membuat peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kecamatan Batu Hampar Meningkatkan kualitas produk pertanian di Kecamatan Batu Hampar
Weaknes (Kelemahan)	Melakukan kerjasama antar kelompok tani Membangun industri untuk mengelola hasil dari pertanian Memberikan pelatihan kreativitas dan inovasi kepada masayarkat Kecamatan Batu Hampar Mempermudah dalam mengurus sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh pemerintah setempat. Membuat lapangan pekerjaan baru.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal yang dapat berdaya saing dengan tenaga kerja dari luar. Membuat prodduk pertanian yang andal dapat berdaya saing

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Dari hasil analisa SWOT diatas dapat diketahui bahwa strategi yang akan digunakan dalam hal mengatasi akan masalah kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian
2. Peningkatan swadaya masyarakat dalam kualitas ekonomi.
3. Meningkatkan manajemen pasar

4. Mempermudah pemberian sertifikat tanah dan dalam mendirikan usaha perekonomian.

Adapun program untuk bidang ekonomi dapat dirincikan berdasarkan strategi yang telah di hasilkan dari proses analisis SWOT, adapun program mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan pelayanan dan produktivitas pasar tradisonal di Kecamatan Batu Hampar
2. Mengembangkan kegiatan UMKM masyarakat untuk mengembangkan usaha
3. Membuat suatu organisasi pemuda dalam melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya Peningkatan produksi pertanian.
4. Sosialisasi keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan Kecamatan Batu Hampar.
5. Membuat iklan, poster dan blog yang bertujuan mempromosikan Kecamatan Batu Hampar.
6. Pelatihan pengelolaan pertanian rakyat bagi pemuda kampung
7. Pelatihan pembuatan pupuk organik dan Bio Gas kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar
8. Pemberian sertifikat tanah secara gratis
9. Pembangunan gedung Bumkampung dan Bapekam.
10. Peningkatan produksi pertanian.
11. Pengolahan lahan pertanian.

12. Memberikan motivasi dan inovasi kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhannya.
13. Mempermudah urusan mendirikan usaha kepada masyarakat Kecamatan Batu Hampar
14. Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat dalam hal membangun pondasi ekonomi kerakyatan
15. Program Peningkatan ekonomi di Kecamatan Batu Hampar.
16. Meningkatkan keterampilan masyarakat di Kecamatan Batu Hampar.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam studi penelitian strategi penanganan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Studi Kasus di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir) , dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Batu Hampar

Berdasarkan hasil analisis karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau didapatkan terdapat berbagai indikator yang mempengaruhi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau antara lain aspek kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan. Karakteristik kemiskinan pada aspek kesehatan dengan kategori sangat setuju, setuju dan cukup, dengan nilai *range* antara (43%-92,4%). Karakteristik kemiskinan pada aspek pendidikan dengan kategori sangat setuju, setuju dan cukup dengan nilai *range* antara (40%-85,6%). Karakteristik kemiskinan pada standar kehidupan dengan kategori cukup dengan *range* antara (70%-83%).

2. Analisis Faktor Kemiskinan Kecamatan Batu Hampar

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan dalam analisis faktor kemiskinan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan, taraf kebutuhan ekonomi, kesejahteraan, pendapatan, penangguran, tanggungan keluarga, keterbatasan modal usaha, status pekerjaan, dan penghasil yang rendah, Faktor tersebutlah yang mempengaruhi akan tingkat kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar. Faktor mempengaruhi kemiskinana di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir dengan kategori cukup dan sangat setuju dengan *range* antara (62%-94%).

3. Strategi Penanganan Kemiskinan

Hasil yang didapatkan dari strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau antara lain dengan melakukan optimalisasi dan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, peningkatan swadaya masyarakat dalam kualitas ekonomi, meningkatkan manajemen pasar, mempermudah dalam hal pemberian sertifikat tanah dan dalam mendirikan usaha perekonomian. Program yang mengatasi akan masalah kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar antara lain; meningkatkan pelayanan dan produktivitas pasar tradisonal di Kecamatan Batu Hampar, mengembangkan kegiatan umkm masyarakat untuk mengembangkan usaha, membuat suatu organisasi pemuda dalam melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya peningkatan produksi pertanian, sosialisasi keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan

bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan Kecamatan Batu Hampar, membuat iklan, poster dan blog yang bertujuan mempromosikan Kecamatan Batu Hampar, pelatihan pengelolaan pertanian rakyat bagi pemuda kampung, pelatihan pembuatan pupuk organik dan bio gas kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar, pemberian sertifikat tanah secara gratis, pembangunan gedung bumkampung dan bapeka, peningkatan produksi pertanian, pengolahan lahan pertanian, memberikan motivasi dan inovasi kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhannya, mempermudah urusan mendirikan usaha kepada masyarakat Kecamatan Batu Hampar, mengembangkan potensi sda dan potensi masyarakat dalam hal membangun pondasi ekonomi kerakyatan, program peningkatan ekonomi di Kecamatan Batu Hampar, meningkatkan keterampilan masyarakat di Kecamatan Batu Hampar.

6.2 Saran

1. Kepada pemerintah baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota agar mendukung program-program dari pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan.
2. Kepada pihak Swasta agar mampu berkontribusi dalam membantu pihak pemerintah dalam menjaga pembangunan yang telah ada dan ikut serta dalam mendukung setiap program yang akan di rencanakan guna untuk kepentingan dan kebaikan bersama.

3. Kepada masyarakat yang di sekitar Kecamatan Batu Hampar, agar mampu mendukung dalam segala program yang akan di laksanakan oleh pemerintah dalam upaya penanganan kemiskinan. Pihak masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi serta menjaga segala program yang telah di lakukan, dimana tanpa adanya dukungan dari masyarakat tentu suatu program tidak akan dapat berjalan dengan baik dan sempurna.
4. Dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebaiknya wilayah yang dikaji lebih kecil dan penambahan akan indikator-indikator dalam penentuan akan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2

Sumber Jurnal

Afzal, M. (2012). Et all. 2012. Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan: An Econometric Analysis. Journal of Elementary Education. 22 (1): 23-45

Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktek. Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bappenas Diah, (2007), Program Nasional Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, Pinter Panduan Penulisan, Skripsi.

Chambers, Robert. (1998). Pengembangan Desa Mulai Dari Belakang. LP3ES ; Jakarta

Chriswardani, Suryawati. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol 8/No.03/september/2005.Hal: 121-129.<http://www.jmpk-online.net>

George, Henry. (1881). Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth; The Remedy. Kegan Paul (reissued by Cambridge University Press, 2009; ISBN 978-1-108-00361-2)

Harniati. (2010). Program-program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.

Hasan, Iqbal. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hudaya,Dadan.(2009).Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

H, S. Y. (2012). Penanggulangan Kemiskinan. *Dialog Vol. 36, No.2, November 2012* , 36, 109-112.

Jarnasy, Owin. (2004). Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Belantika. Jakarta.

Kasim, Muslim. (2006). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya (Studi Kasus di Kabupaten Padang Mariaman. Jakarta: Indomedia.

Komalasari, Gantina., Eka Wahyuni., dan Karsih. (2011). Teori dan Teknik Konseling. Jakarta: Indeks.

Lutfi (2015). Pengembangan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Klaten. Jurnal Bumi Indonesia. Diperoleh dari [https://media.neliti.com/media/publications/222983 - pengembangan wilayah – tertinggal – di - kabup.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/222983-pengembangan-wilayah-tertinggal-di-kabup.pdf).

Midgley, (2004), Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – Jakarta.

Marzuki, (2005), Metodologi Riset, Yogyakarta: Ekonisia.

Munawar, Noor. (2014). Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang). Jurnal Ilmiah. UNTAG. Semarang

Nurwati*, N. (2008). Kemiskinan :. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 - 11 , 10, 10-11.

Nursalam (2003). Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.

Purnama. (2015). “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara”. Jurnal Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ritonga, Hamonangan. (2003). Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta: Badan pusat Statistik.

Riduwan. (2004). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.

Saharia, (2003). Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan Sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Manusia Secara Optimal” Makalah Individu. *Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Program Pascasarjana/S3. Institut Pertanian Bogor.*

Suharto, (2003). Paradigma Baru studi Kemiskinan, <http://immugm.org.public.html.arti cle.php?story=2003091119480812>

Suparlan, (ed). (2005). Kemiskinan di Perkotaan Untuk Antropologi. Yayasan Obor Indonesia Sinar Harapan. Jakarta.

Suryawati. (2004). Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.

Sugiyono, (2013), Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Sangadji, E. M. dan Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: C.V Andi.

Suroyo Anwar,. (2009). Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview,. Kuesioner dan Sosiometri. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael, P. (2000). Pembangunan Ekonomi. Jakarta : BUMIAKSARA

Valenzuela, Rebecca. (2010). Economic Development in Asia. Second Edition.
Singapore: CENGAGE Learning.

Sumber Dokumen

Badan Pusat Statistik (2017) Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Gambaran
Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka.

Dinas Sosial (2017) Daerah Kabupaten Rokan Hilir,

